



**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN
BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 2025

Jl. Khatib Sulaiman No. 106 Padang-Sumbar
Telp. (0751) 7057802,
Fax (0751) 7050424



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR & BINA KONTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sumber Daya Air & Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sumber Daya Air & Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Ucapan Alhamdulillah dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan ridho, rahmat dan berkat-Nya Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berisikan sejauh mana sasaran strategis dan target indikator kerjanya bisa dicapai lewat penggunaan anggaran yang telah disediakan dalam mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah 2021-2026 sasaran ke-4 (empat) yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian. Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi acuan dalam transisi dari akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan awal periode 2025-2029.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat ini disusun, semoga memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2026

**Kepala Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat,**



RIEDA SURIANI, ST, Sp.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680516 199503 2 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Gambaran Organisasi	I - 1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	I - 1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I - 1
1.1.3 Struktur Organisasi	I - 6
1.1.4 Sumber Daya Manusia	I - 7
1.2 Aspek Strategis Organisasi	I - 9
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi	I - 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	II - 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II - 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	III - 1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	III - 3
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	III - 4
3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	III - 4
3.3.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-11
3.3.1.2 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-20
3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-21
3.3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-22
3.3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-22

3.3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-28
3.3.2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kapasitas Daya Tampung Infrastruktur Sumber Air	III-29
3.3.2.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-30
3.3.2.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-32
3.3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-33
3.3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-34
3.3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-35
3.3.2.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-35
3.3.3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air	III-36
3.3.3.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-42
3.3.3.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-52
3.3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-53
3.3.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-54
3.3.3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-54
3.3.3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-55

3.3.4	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Jasa Konstruksi	III-57
3.3.4.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-57
3.3.4.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-59
3.3.4.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-60
3.3.4.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-61
3.3.4.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-61
3.3.4.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-62
3.3.5	Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi	III-67
3.3.5.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-69
3.3.5.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-70
3.3.5.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-71
3.3.5.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-72
3.3.5.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-72
3.3.5.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-72
3.3.6	Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	III-73
3.3.6.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-74

3.3.6.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-74
3.3.6.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-76
3.3.6.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-77
3.3.6.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-77
3.3.6.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-78
3.3.7	Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	III-78
3.3.7.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	III-79
3.3.7.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III-81
3.3.7.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	III-82
3.3.7.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	III-83
3.3.7.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	III-83
3.3.7.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-83
3.4	Realisasi Anggaran	III-84
BAB IV	PENUTUP	IV-1
4.1	Kesimpulan	IV-1
4.2	Langkah Perbaikan ke Depan	IV-4
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar	I - 6
Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan per Januari 2026	I - 7
Gambar 1.3 Grafik Perbandingan Jumlah PNS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenjang Pendidikan per Januari 2026	I - 8
Gambar 1.4 Grafik Jumlah PNS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dari Tahun ke Tahun	I - 9
Gambar 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	III – 2
Gambar 3.2 Peta Area Rawan Banjir WS Silaut - Tarusan	III-40
Gambar 3.3 Peta Area Rawan Banjir WS Masang - Pasaman	III-40
Gambar 3.4 Peta Area Rawan Abrasi Pantai WS Silaut - Tarusan	III-41
Gambar 3.5 Peta Area Rawan Abrasi Pantai Masang - Pasaman	III-41
Gambar 3.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dari Tahun ke Tahun	III-75
Gambar 3.7 Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	III-77

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan per Januari 2026	I-7
Tabel 1.2	Jumlah PNS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan per Januari 2024	I-8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	II-3
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	II-4
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-5
Tabel 3.1	Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Tujuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-4
Tabel 3.3	Daerah Irigasi Permukaan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	III-7
Tabel 3.4	Daerah Irigasi Rawa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	III-10
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Kinerja Sistem Irigasi	III-11
Tabel 3.6	Formulasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi 2025	III-15
Tabel 3.7	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Indeks Kinerja Sistem Irigasi	III-20
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Indeks Kinerja Sistem Irigasi	III-21
Tabel 3.9	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Penunjang Prasarana Fisik IKSI Tahun 2025	III-23
Tabel 3.10	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air	III-30
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air	III-32

Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air	III-33
Tabel 3.13	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air	III-34
Tabel 3.14	DAS Wilayah Sungai Silaut - Tarusan	III-36
Tabel 3.15	DAS Wilayah Sungai Masang - Pasaman	III-38
Tabel 3.16	Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat	III-39
Tabel 3.17	Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat	III-41
Tabel 3.18	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air	III-42
Tabel 3.19	Daftar Output Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025	III-43
Tabel 3.20	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air	III-52
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air	III-53
Tabel 3.22	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air	III-54
Tabel 3.23	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini Persentase Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	III-57
Tabel 3.24	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Persentase Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	III-59
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Persentase Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	III-60

Tabel 3.26	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen Binkon Kementerian PUPR Persentase Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	III-61
Tabel 3.27	Daftar Tenaga Kerja yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli Tahun 2025	III-63
Tabel 3.28	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	III-69
Tabel 3.29	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	III-70
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	III-71
Tabel 3.31	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja	III-74
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Nilai Akuntabilitas Kinerja	III-76
Tabel 3.33	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	III-79
Tabel 3.34	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	III-81
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	III-82
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	III-85
Tabel 4.1	Perbandingan Renja dan Pagu APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	IV-2
Tabel 4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	IV-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dibentuk untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sektor Sumber Daya Air dan Sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang

menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor sumber daya air dan sektor bina konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor sumber daya air dan sektor bina konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor sumber daya air dan bina konstruksi);
- e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat memiliki 3 Bidang, 2 UPTD dan Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pengelolaan data dan publikasi, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan kantor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan data dan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas menyusun, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan jaringan sumber air;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jaringan sumber air;
- c. Melaksanakan konstruksi dan non konstruksi jaringan sumber air;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan jaringan sumber air;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada jaringan sumber air;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- h. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas menyusun, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan jaringan Pemanfaatan air;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jaringan pemanfaatan air;
- c. Melaksanakan konstruksi dan non konstruksi jaringan pemanfaatan air;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan jaringan pemanfaatan air;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada jaringan pemanfaatan air;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- h. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Menyelenggarakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- g. Menyelenggarakan pemantauan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- h. Menyelenggarakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jasa konstruksi;
- k. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

UPTD Balai Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air;
- c. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengendalian kerusakan banjir dan pencemaran air;
- d. Pelaksanaan pelayanan sekaligus administratif dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi terdiri dari:

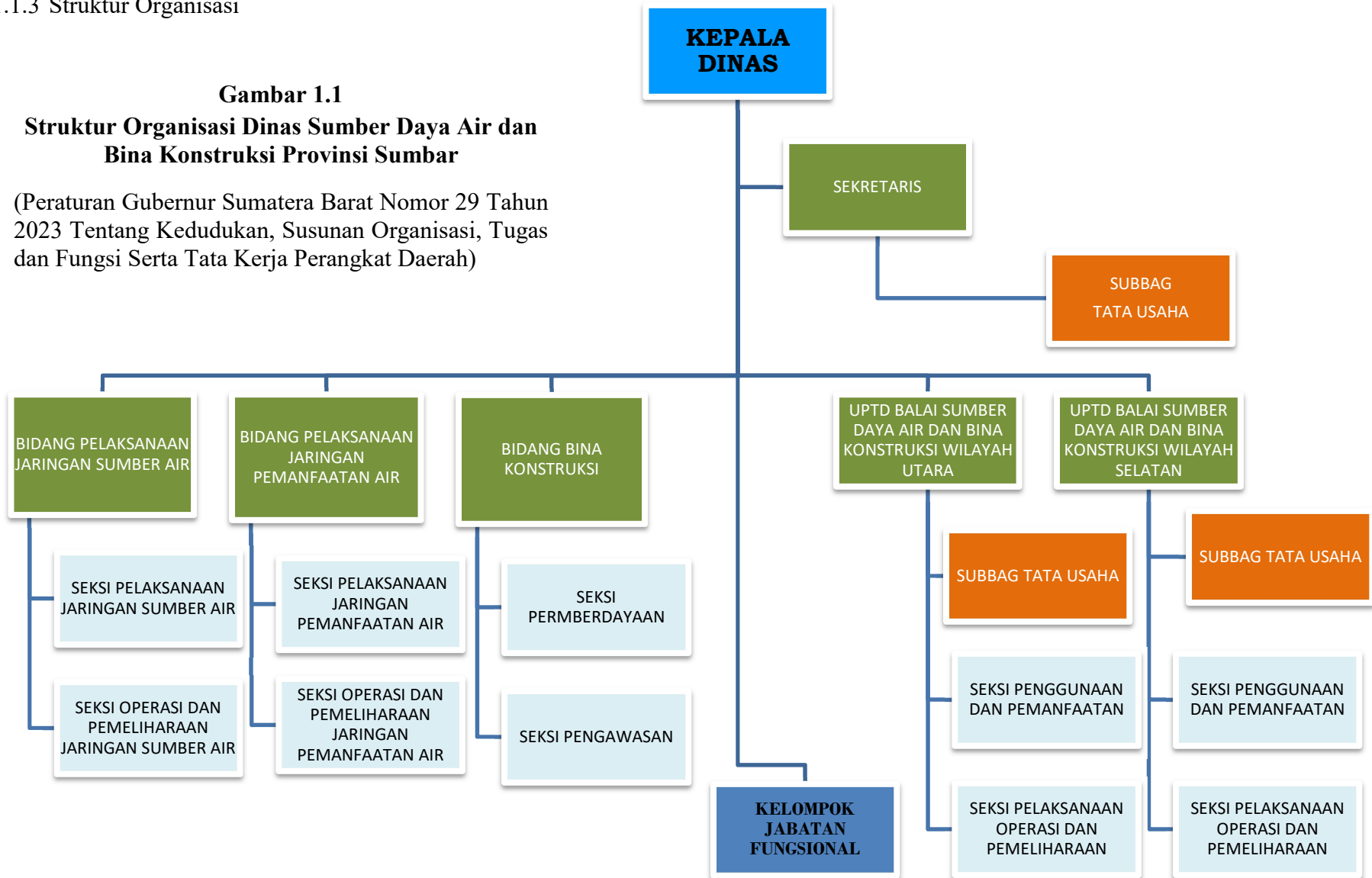
- i. UPTD Balai Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Wilayah Utara yang berkantor di Kota Bukittinggi, dan;
- ii. UPTD Balai Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan yang berkantor di Sumani Kabupaten Solok.

1.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar

(Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)

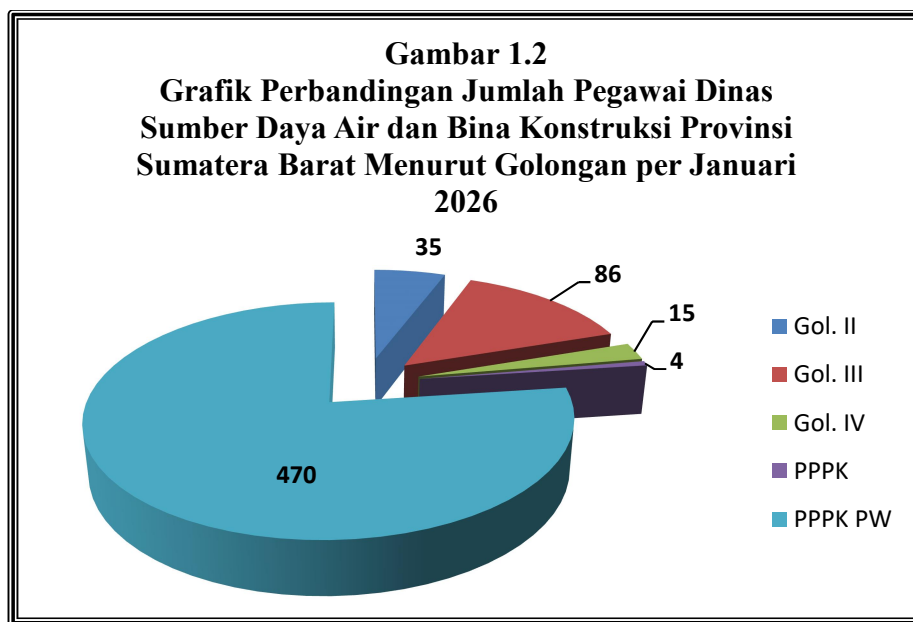


1.1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

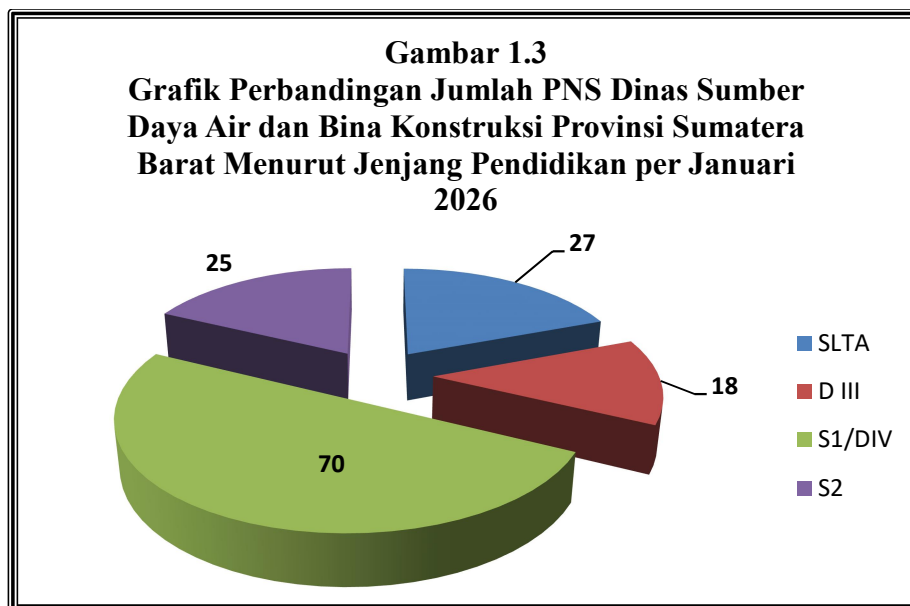
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan per Januari 2026

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	15
2	III	86
3	II	35
4	PPPK	4
5	PPPK Paruh Waktu (PW)	470
	Jumlah	610



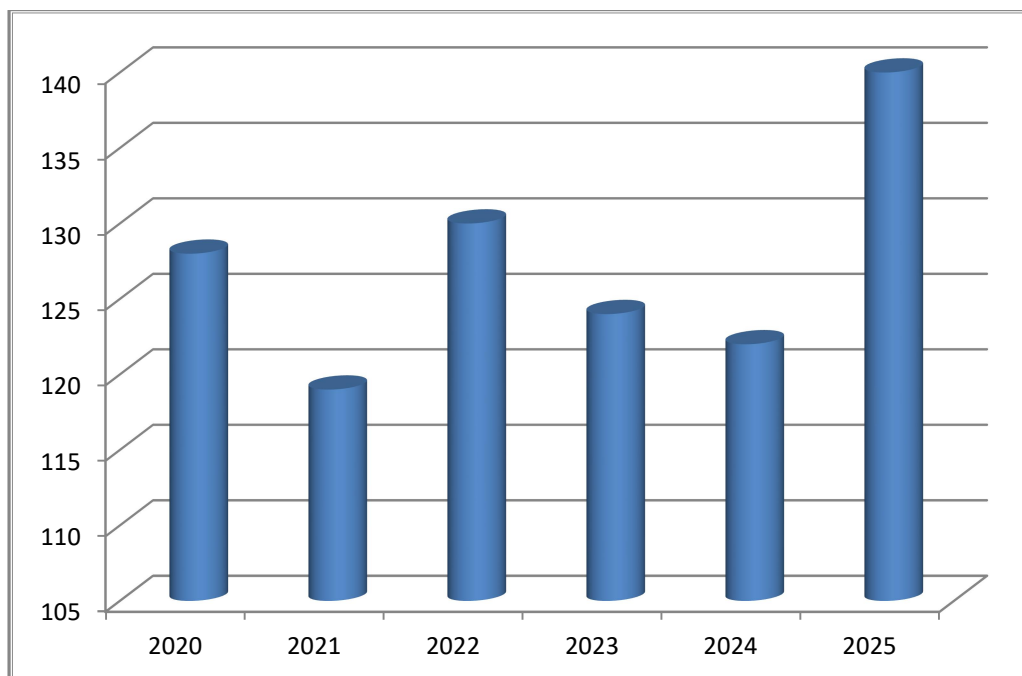
Tabel 1.2
Jumlah PNS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan per
Januari 2026

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	
		Teknik	Non Teknik
1	S3	0	0
2	S2	24	1
3	S1 / DIV	47	23
4	D III	14	4
5	SLTA	0	27
	Jumlah	85	55
	Total	140	



Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat tiap tahunnya fluktuatif yang disebabkan oleh adanya PNS yang pensiun dan pindah tugas yang tentunya hal ini sedikit berpengaruh terhadap kelancaran Bergeraknya roda organisasi. Namun pada tahun 2025 ini terjadi penambahan PNS melalui jalur penerimaan secara nasional. Grafik dinamika jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 1.4
Grafik Jumlah PNS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat dari Tahun ke Tahun



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang juga merupakan Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu "**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**", dimana visi tersebut merupakan kondisi objekif yang akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang yang kemudian diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;**
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di atas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat berperan dalam pencapaian misi ke-6 (enam) dengan tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Misi ke 6 ini ini diuraikan menjadi 5 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi;
2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
4. **Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian;**
5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Dari 5 (lima) sasaran tersebut di atas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menjalankan sasaran ke-4 (empat).

Kondisi yang mengakibatkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menjadi pengampu tujuan dan sasaran yang telah disebut di atas tidak lain disebabkan oleh potensi sumber daya berikut ini:

1. Provinsi Sumatera Barat memiliki sungai yang mencapai 3.033 buah sungai (termasuk sungai utama dan anak-anak sungai). Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Sungai Silaut - Tarusan (7.052,15 km²) dan Wilayah Sungai Masang - Pasaman (5.668,3375 km²).
2. Provinsi Sumatera Barat mempunyai mempunyai garis pantai keseluruhan ± 1.637 km;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (menggantikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014) status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Daerah Irigasi dengan luas total 70.707 ha yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) Daerah Irigasi Permukaan dengan luas 65.007 Ha dan 3 (tiga) Daerah Irigasi Rawa seluas 5.700 Ha.
4. Tingginya potensi sumber daya manusia dan badan usaha jasa konstruksi yang untuk mendukung kelancaran keberlangsungan usaha jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi maka peran yang bisa diambil oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi adalah:

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan dengan cara meningkatkan infrastruktur konservasi sumber daya air pada daerah resapan dan tangkapan air.
2. Mendukung peningkatan produksi pangan serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dengan cara meningkatkan kualitas dan menjaga fungsi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.
3. Melakukan pengelolaan risiko/mitigasi bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menjaga fungsi

infrastruktur pengendalian daya rusak air untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.

4. Melakukan peningkatan kapasitas pelaku konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi, melakukan sosialisasi peraturan terkait jasa konstruksi, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi dan melakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Kemudian dalam menjalani peran tersebut akan diterapkan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif;
2. Peningkatan daya tampung air;
3. Peningkatan luas kawasan yang dilindungi dari daya rusak air; dan
4. Pelaksanaan pelatihan, pembinaan, peningkatan, pemantauan, evaluasi, sosialisasi, pengawasan bidang jasa konstruksi.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi di masa lima tahun mendatang. Disamping itu isu-isu strategis yang berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi juga dijelaskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Banyaknya irigasi yang rusak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga irigasi dapat berfungsi optimal;
2. Keterlibatan tiga level pemerintahan, pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan irigasi membutuhkan peningkatan koordinasi dan sinergi antar tingkatan pemerintahan, termasuk antar organisasi perangkat daerah lingkup pertanian;
3. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas;
4. Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Belum optimalnya kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat;
2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/nonpertanian;
3. Adanya ancaman daya rusak air (banjir, galodo, aliran debris dan abrasi pantai);
4. Belum memadainya bangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang makin meningkat di masa datang;
5. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air;
6. Belum tertatanya sistem database dan informasi sumber daya air dan bina konstruksi yang baik;
7. Minimnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan infrastruktur Sumber Daya Air;
8. Infrastruktur terbangun banyak yang umurnya telah melampaui usia rencana yang rentan terhadap bencana;
9. Masih rendahnya pelaku konstruksi berkompentensi dan profesional;
10. Belum optimalnya penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelaksanaan jasa konstruksi;
11. Minimnya jumlah badan usaha yang profesional dan berkinerja baik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan (jangka menengah) yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif.

Dengan berlandaskan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke-6 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dan Sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian, maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan tepat guna;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani.

Maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disebutkan di atas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu RPJMD tahun 2021-2026 menetapkan sasaran-sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja sistem irigasi
- 2) Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air
- 3) Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air
- 4) Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi
- 5) Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi
- 6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah (selama lima tahun) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat beserta indikator dan target kinerjanya dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan tepat guna		Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	61,94	63,55	65,16	66,76	68,37	69,98
		1 Meningkatkan kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	68,80	70,36	71,92	73,48	75,04	76,60
		2 Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
		3 Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,55
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi		Persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi	54,93	55,16	56,45	57,24	58,09	58,93
		4 Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	19,86	20,32	20,90	21,48	22,17	22,86
		5 Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	90,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00
3	Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai akuntabilitas kinerja ▪ Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi 						
		6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	BB	A	A	A	A	A
		7 Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	-	80,40	82,50	85,00	87,50	90,00

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025 tersaji seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Perubahan
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	70,79%	70,79%
2	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40%	59,40%
3	Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38%	68,38%
4	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,59%	21,57%
5	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00%	94,00%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A(81,00)	A(81,00)
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	87,50

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.678.493.054	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	91.548.837.033	APBD
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	846.360.470	APBD
	JUMLAH	122.073.690.557	

Sumber Data : DPPA Dinas SDABK Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

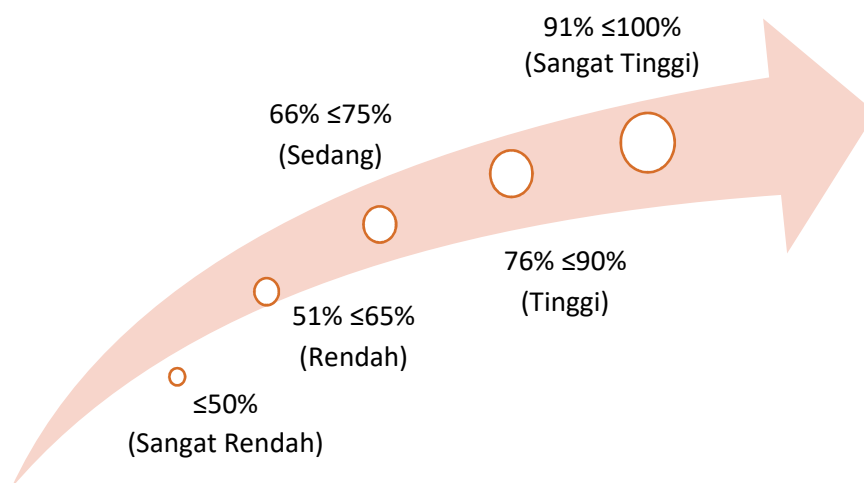
$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.1. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja



Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	70,79	70,92	100,19
2	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40	59,40	100,00
3	Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38	69,16	101,14
4	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,57	21,57	100,00
5	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00	100,00	106,38
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A(81,00)	A(82,77)	102,19
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	87,75	100,29

Sumber Data : Dinas SDABK Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat adalah 101,45%. Sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi (106,38%) dan capaian

terendah adalah sasaran meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air dan meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi (100%).

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mencanangkan tujuan dalam dokumen rencana strategis 2021-2026 dengan rincian dan realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Tujuan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	TUJUAN	INDIKATOR	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan tepat guna	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	68,37%	66,49%	97,25
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi	58,09%	60,78%	104,63
3	Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja	A (81,00)	A (82,77)	102,19
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	87,75	100,29

Sumber Data : Dinas SDABK Tahun 2025

Dari tujuan di atas kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang target dan realisasinya dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, irigasi dimaksud sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kemudian dalam peraturan tersebut juga tercantum bahwa sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sejalan dengan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air atau sumber air dengan menetapkan status daerah irigasi serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sektor Sumber Daya Air maka ditetapkanlah sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem irigasi.

Sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem irigasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indeks dan Bobot Penilaian Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Utama terdiri dari beberapa komponen dalam pengelolaan sistem irigasi utama dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. Prasarana fisik (bobot 45%), dengan rincian yaitu :
 - i. Bangunan utama (13%)
 - ii. Saluran pembawa (10%)
 - iii. Bangunan pada saluran pembawa (9%)
 - iv. Saluran pembuang dan bangunannya (4%)
 - v. Jalan masuk/inspeksi (4%)
 - vi. Kantor, perumahan dan gudang (5%)
- b. Produktivitas tanaman (bobot 15%), dengan rincian yaitu :
 - i. Pemenuhan kebutuhan air/faktor K (9%)
 - ii. Realisasi luas tanam (4%)
 - iii. Produktivitas padi (2%)
- c. Sarana penunjang (bobot 10%), dengan rincian yaitu :
 - i. Peralatan Operasi dan Pemeliharaan (4%)
 - ii. Transportasi (2%)

- iii. Alat-alat kantor (2%)
- iv. Alat komunikasi (2%)
- d. Organisasi personalia (bobot 15%), dengan rincian yaitu :
 - i. Organisasi Operasi dan Pemeliharaan (5%)
 - ii. Personalia (10%)
- e. Dokumentasi (bobot 5%), dengan rincian yaitu :
 - i. Buku Data Daerah Irigasi (2%)
 - ii. Peta dan gambar-gambar (3%)
- f. Perkumpulan Petani Pemakai Air/IP3A/GP3A (bobot 10%), dengan rincian yaitu:
 - i. GP3A/IP3A yang sudah berbadan hukum (1,5%)
 - ii. Kondisi kelembagaan GP3A/IP3A (0,5%)
 - iii. Rapat P3A/GP3A/IP3A dengan pengamat (2%)
 - iv. GP3A/IP3A aktif penelurusan jaringan (1%)
 - v. Partisipasi GP3A/IP3A dalam perbaikan jaringan dan penanganan bencana alam (2%)
 - vi. Iuran GP3A/IP3A untuk partisipasi perbaikan jaringan utama (2%)
 - vii. Partisipasi GP3A/IP3A dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air (1%).

Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan nilai maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5, dimana skala penilaiannya adalah:

- 80 – 100 : kinerja sangat baik
- 70 – 79 : kinerja baik
- 55 – 69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (menggantikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014) status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Daerah Irigasi dengan luas total 70.707 Ha yang terdiri dari 65 (enam puluh lima)

Daerah Irigasi Permukaan dengan luas 65.007 Ha dan 3 (tiga) Daerah Irigasi Rawa seluas 5.700 Ha.

Tabel 3.3
Daerah Irigasi Permukaan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Jumlah D.I.	Luasan (Ha)	Keterangan
A	Lintas Kabupaten/Kota	29 D.I.	10.329 Ha	
1	D.I Batang Lampasi		2.180 Ha	Kab. 50 Kota = 859 Ha Kota Payakumbuh = 1.321 Ha
2	D. I. Batang Tabik		1.007 Ha	Kab. 50 Kota = 693 Ha Kota Payakumbuh = 314 Ha
3	D.I Batang Agam		633 Ha	Kab. 50 Kota = 40 Ha Kota Payakumbuh = 593 Ha
4	D.I Batang Talawi		200 Ha	Kab. 50 Kota = 40 Ha Kota Payakumbuh = 160 Ha
5	D.I Sungai Dareh		617 Ha	Kab. 50 Kota = 25 Ha Kota Payakumbuh = 592 Ha
6	D.I Bandar Pamujan		190 Ha	Kab. Solok = 75 Ha Kota Solok = 115 Ha
7	D.I Bdr Panjang Selayo		128 Ha	Kab. Solok = 60 Ha Kota Solok = 68 Ha
8	D.I Bdr Batang Lembang		750 Ha	Kab. Solok = 601 Ha Kota Solok = 149 Ha
9	D.I Bandar Halim`		657 Ha	Kab. Solok = 650 Ha Kota Solok = 7 Ha
10	D.I Pompa VII		98 Ha	Kab. Solok = 5 Ha Kota Solok = 93 Ha
11	D.I Bandar Garegeh		98 Ha	Kab. Agam = 73 Ha Kota Bukittinggi = 25 Ha
12	D.I Bandar Pulaui		66 Ha	Kab. Agam = 48 Ha Kota Bukittinggi = 18 Ha
13	D.I Bandar Durian		200 Ha	Kab. Agam = 198 Ha Kota Bukittinggi = 2 Ha

14	D.I Bandar Rakik		97 Ha	Kab. Agam	=	86 Ha
				Kota Bukittinggi	=	11 Ha
15	D.I Bandar Kubu Banda		675 Ha	Kab. Agam	=	402 Ha
				Kota Bukittinggi	=	273 Ha
16	D.I Bandar Batu Hampa		100 Ha	Kab. Agam	=	85 Ha
				Kota Bukittinggi	=	15 Ha
17	D.I Bandar Sibaragung		600 Ha	Kab. Agam	=	560 Ha
				Kab. Padang Pariaman	=	40 Ha
18	D.I Bandar Ipuh		70 Ha	Kab. Agam	=	43 Ha
				Kab. Padang Pariaman	=	27 Ha
19	D.I Gadang Sini Air		54 Ha	Kab. Agam	=	54 Ha
				Kab. Padang Pariaman	=	Bendung Ha
20	D.I Batang Parika		339 Ha	Kab. Tanah Datar	=	329 Ha
				Kota Padang Panjang	=	10 Ha
21	D.I Bandar Bulaan Dalam		140 Ha	Kab. Tanah Datar	=	110 Ha
				Kota Padang Panjang	=	30 Ha
22	D.I Bandar Gadang Darek		138 Ha	Kab. Tanah Datar	=	120 Ha
				Kota Padang Panjang	=	18 Ha
23	D.I Bdr Gadang II Paninjauan		352 Ha	Kab. Tanah Datar	=	252 Ha
				Kota Padang Panjang	=	100 Ha
24	D.I Bandar Rupik		42 Ha	Kab. Tanah Datar	=	42 Ha
				Kota Padang Panjang	=	Bendung Ha
25	D.I Bandar Jambu		33 Ha	Kab. Tanah Datar	=	7 Ha
				Kota Padang Panjang	=	26 Ha
26	D.I Bandar Sigando		56 Ha	Kab. Tanah Datar	=	49 Ha
				Kota Padang Panjang	=	7 Ha
27	D.I Bandar Muka Air		56 Ha	Kab. Tanah Datar	=	41 Ha

				Kota Padang Panjang = 15 Ha
28	D.I Bandar Sangki II		581 Ha	Kab. Tanah Datar = 423 Ha
				Kota Padang Panjang = 158 Ha
29	D.I Sawah Aru		172 Ha	Kab. Padang Pariaman = 142 Ha
				Kota Pariaman = 30 Ha
B	Utuh Kabupaten/Kota	36 D.I.	54.677 Ha	
a	Kab. Agam			
1	D.I Bandar Batang Dareh		1.128 Ha	
2	D.I Bandar Sangkir Geragahan		1.031 Ha	
3	D.I Baramban III Lurah		1.164 Ha	
4	D.I Batang Gumarang		1.778 Ha	
5	D.I Batang Sianok		1.285 Ha	
b	Kab. Padang Pariaman			
1	D.I Ladang Laweh		1.140 Ha	
2	D.I Sicaung		1.285 Ha	
c	Kab. Pasaman			
1	D.I Batang Tingkarang		2.326 Ha	
d	Kab. Pasaman Barat			
1	D.I Batang Partupangan		1.200 Ha	
2	D.I Kapar Ampu		2.250 Ha	
3	D.I Lubuk Gobing		1.250 Ha	
4	D.I Rimbo Tampurung		1.200 Ha	
e	Kab. Pesisir Selatan			
1	D.I Amping Parak		2.363 Ha	
2	D.I Batang Bayang		1.362 Ha	
3	D.I Batang Surantih		1.864 Ha	
4	D.I Koto Kandis		2.357 Ha	
5	D.I Koto Salapan		1.998 Ha	
6	D.I Lubuak Kubang		1.896 Ha	
7	D.I Lubuak Sariak		1.300 Ha	
8	D.I Malepang		1.813 Ha	
9	D.I Talang Kemuning Jaya		1.930 Ha	
f	Kab. Sijunjung			

1	D.I Sungai Samek		1.158 Ha	
g	Kab. Solok			
1	D.I Bandar Gadang		1.525 Ha	
2	D.I Bintungan		1.017 Ha	
3	D.I Muaro Danau		1.371 Ha	
4	D.I Paneh Gadang		1.007 Ha	
5	D.I Sapan Kayu Manang		1.160 Ha	
h	Kab. Solok Selatan			
1	D.I Bandar Pekonina		1.250 Ha	
2	D.I Bdr Sawah Padang		1.000 Ha	
3	D.I Batang Suliti		1.450 Ha	
4	D.I Bandar Bangko		1.603 Ha	
5	D.I Bandar Sungai Aro		2.739 Ha	
i	Kab. Tanah Datar			
1	D.I Bandar Galo Gandang		1.112 Ha	
2	D.I Batang Selo		1.275 Ha	
j	Kota Padang			
1	D.I Gunung Nago		2.087 Ha	
2	D.I Koto Tuo		1.004 Ha	

Sumber Data : PerMen PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 3.4
Daerah Irigasi Rawa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi Rawa	Jumlah D.I.R.	Luasan (Ha)	Keterangan
a	Kab. Pasaman	<u>3 D.I.R</u>	<u>5.700 Ha</u>	
1	D.I.R Panti/Batang Simpur		2.400 Ha	
b	Kab. Pesisir Selatan			
1	D.I.R Labuhan Tanjak Sungai Kuyung		2.300 Ha	
2	D.I.R Lunang		1.000 Ha	

Sumber Data : PerMen PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah sebagai berikut:

3.3.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menetapkan target untuk indikator kinerja IKSI sebesar 70,79%. Hal ini didasari pada realisasi yang telah diraih tahun 2024 yaitu sebesar 69,98%. Kemudian dari hasil analisis alokasi anggaran yang tersedia pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penopang untuk mendukung pencapaian target maka diprediksi hanya ada penambahan nilai IKSI sebesar lebih kurang 0,81% pada tahun 2025 sehingga ditetapkan target menjadi 70,79%. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang telah dialokasikan tersebut hanya memberikan kontribusi besar terhadap komponen prasarana fisik sedangkan untuk 5 komponen yang lain yaitu produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan petani pemakai air tidak terlalu berpengaruh secara signifikan.

Tabel 3.5
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	70,79%	70,92%	100,19%

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Berdasarkan skala penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi maka realisasi IKSI Tahun 2025 sebesar 70,92 termasuk kategori kinerja baik.

Realisasi IKSI tahun 2025 diperoleh berdasarkan 6 (enam) komponen perhitungan IKSI dengan rincian sebagai berikut:

a) Prasarana fisik

Capaian nilai pada indikator prasarana fisik pada tahun 2025 sebesar **33,69%**. Untuk pencapaian bobot pada indikator ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada 65 Daerah Irigasi dan melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan pada daerah irigasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa perbaikan bangunan utama irigasi/bendung, saluran pembawa (saluran primer

dan saluran sekunder), bangunan pada saluran pembawa (pintu air), dan pelaksanaan operasi serta pemeliharaan daerah irigasi yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Dinas SDABK. Semua kegiatan fisik tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan skala prioritas berdasarkan pagu dana yang tersedia setiap tahunnya.

b) Produktivitas tanaman

Capaian nilai pada indikator produktifitas tanaman yaitu sebesar **9,62%**. Hal ini didapat dari pemenuhan kebutuhan air (faktor K) yang dialiri ke petak sawah fungsional, realisasi luas tanam dan produktivitas padi. Kebutuhan air pada sawah yang akan dialiri berdasarkan kondisi sawah/umur padi. Petugas Pintu Air (PPA) melaksanakan tugas membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang masuk ke sawah sesuai dengan perintah juru. Data debit air yang masuk ke saluran di kontrol dan di catat oleh Petugas Operasi Bendung (POB) dan dikumpulkan oleh juru pada masing-masing daerah irigasi. Data debit air yang dikumpulkan juru dicatat, direkap dan dikumpulkan oleh staf pada Kantor Pengamat Irigasi sebagai data pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi.

c) Sarana penunjang

Capaian nilai pada indikator sarana penunjang yaitu sebesar **6,68%**. Hal ini diukur dari ketersediaan peralatan operasi dan pemeliharaan, alat transportasi, alat-alat kantor dan alat komunikasi yang dimiliki dan dipergunakan oleh petugas operasi dan pemeliharaan daerah irigasi.

d) Organisasi personalia

Capaian nilai pada indikator organisasi personalia yaitu sebesar **11,59%**. Nilai pada indikator ini diperoleh dari ketersediaan organisasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi serta ketersediaan personalianya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 (sembilan) Kantor Pengamat Irigasi yang tersebar pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dari sembilan kepengamatan irigasi tersebut, terdapat 5 (lima) kepengamatan irigasi yang berada di bawah koordinasi UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara dan 4 (empat) kepengamatan irigasi yang berada di bawah koordinasi UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan.

Untuk organisasi personalia operasi dan pemeliharaan irigasi pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara memiliki :

- Pengamat : 5 orang
- Staf Pengamat : 34 orang
- Juru : 25 orang
- POB : 60 orang
- PPA : 148 orang

Pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan memiliki organisasi personalia operasi dan pemeliharaan irigasi sebagai berikut :

- Pengamat : 4 orang
- Staf Pengamat : 20 orang
- Juru : 30 orang
- POB : 37 orang
- PPA : 97 orang

e) Dokumentasi

Capaian nilai pada indikator dokumentasi yaitu sebesar **4,24%**. Nilai pada indikator ini diperoleh dari ketersediaan buku data daerah irigasi (data curah hujan, data debit sungai, data klimatologi, dll), peta wilayah kerja pengelolaan irigasi, peta daerah irigasi, dan gambar/skema jaringan irigasi, skema rencana pembagian dan pemberian air, gambar purna konstruksi serta dokumentasi dari daerah irigasi.

f) Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A)

Capaian nilai pada indikator Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A) yaitu sebesar **5,10%**. Nilai indikator ini diperoleh dari jumlah GP3A/IP3A yang sudah berbadan hukum, kondisi kelembagaan GP3A/IP3A, jumlah pelaksanaan rapat P3A/GP3A/IP3A dengan pengamat, keaktifan GP3A/IP3A dalam penelurusan jaringan, partisipasi GP3A/IP3A dalam perbaikan jaringan dan penanganan bencana alam, adanya iuran GP3A/IP3A untuk partisipasi perbaikan jaringan utama, serta adanya keterlibatan dan partisipasi GP3A/IP3A dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air ke sawah.

Dalam kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan

keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan. Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat petani pemakai air, P3A/GP3A/IP3A kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasi didapat melalui usulan dari P3A/GP3A/IP3A, dengan proses sebagai berikut :

- P3A/GP3A/IP3A mengusulkan rencana tanam dan luas areal kepada dinas melalui UPTD.
- UPTD bersama-sama Dinas Pertanian menyusun rencana tanam dan luas areal tersebut.
- Komisi Irigasi yang beranggotakan instansi terkait dan wakil perkumpulan petani pemakai air membahas pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan air irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Dinas yang membidangi irigasi dan melaksanakan operasi jaringan irigasi melibatkan P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaannya.

Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi untuk setiap Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat secara rinci ditampilkan pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Formulasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi 2025

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Sawah/Fung sional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)							Ket.
					Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumen tasi	P3A/GP3A /IP3A	Jumlah	
					Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%	
1	D.I	Bandar Gadang	1.525	1.153,00	40,76	13,00	6,00	11,01	4,25	3,55	78,57	
2	D.I	Bintungan	1.017	574,99	41,12	13,00	6,00	11,01	4,25	8,08	83,46	
3	D.I	Muaro Danau	1.371	1.236,37	33,44	10,00	6,00	11,01	4,25	1,82	66,52	
4	D.I	Paneh Gadang	1.007	504,16	40,52	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	78,63	
5	D.I	Bandar Sapan Kayu Manang	1.160	564,22	31,58	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	69,69	
6	D.I	Bandar Pamujan	190	252,53	26,86	14,88	7,65	11,29	4,25	6,22	71,15	
7	D.I	Bandar Panjang Selayo	128	200,43	34,81	13,00	7,38	10,94	4,25	6,02	76,40	
8	D.I	Bandar Lembang	750	705,90	42,33	13,00	6,00	11,01	4,25	6,66	83,25	
9	D.I	Bandar Halim	657	791,74	43,92	13,00	6,00	11,01	4,25	3,85	82,03	
10	D.I	Pompa VII	98	46,71	29,37	13,00	6,00	11,01	4,25	1,82	65,45	
11	D.I	Sungai Samek	1.158	105,58	32,77	7,00	7,90	12,37	4,25	8,52	72,81	
12	D.I	Amping Parak	2.363	490,89	43,21	12,01	7,85	12,07	4,25	8,18	87,57	
13	D.I	Batang Bayang	1.362	1.041,42	36,81	10,32	6,00	11,01	4,25	8,37	76,76	

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Sawah/Fung sional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)							Ket.
					Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumen tasi	P3A/GP3A /IP3A	Jumlah	
					Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%	
14	D.I	Batang Surantih	1.864	1.268,15	37,52	9,18	8,46	11,01	4,25	7,83	78,25	
15	D.I	Koto Kandis	2.357	1.797,43	20,13	10,29	8,43	12,61	4,25	8,31	64,03	
16	D.I	Koto Salapan	1.998	757,77	40,56	11,56	8,50	12,76	4,25	8,32	85,95	
17	D.I	Lubuak Sariak	1.300	255,90	29,94	7,00	6,00	11,01	4,25	8,21	66,41	
18	D.I	Lubuak Kubang	1.896	34,76	20,00	7,00	6,00	11,01	4,25	6,02	54,28	
19	D.I	Malepang	1.813	142,73	30,25	7,00	7,10	11,01	4,25	8,31	67,92	
20	D.I	Talang Kemuning Jaya	1.930	905,60	35,72	7,00	6,00	11,01	4,25	8,29	72,27	
21	D.I	Pekonina	1.250	462,76	29,69	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	61,80	
22	D.I	Bandar Sawah Padang	1.000	390,92	39,63	7,00	6,00	11,01	4,25	1,82	69,71	
23	D.I	Batang Suliti	1.450	1.036,60	40,98	9,65	6,00	11,01	4,25	3,85	75,74	
24	D.I	Batang Bangko	1.603	692,39	33,45	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	65,56	
25	D.I	Bandar Sungai Aro	2.739	1.014,81	36,60	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	68,71	
26	D.I	Lubuk Gobing	1.250	104,25	29,33	7,00	8,75	12,51	4,25	4,42	66,26	
27	D.I	Kapar Ampu	2.250	323,88	43,39	7,00	8,50	12,61	4,25	7,49	83,24	
28	D.I	Rimbo Tampurung	1.200	503,77	33,95	7,00	6,00	11,01	4,25	3,85	66,06	

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Sawah/Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)							Ket.
					Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumen tasi	P3A/GP3A /IP3A	Jumlah	
					Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%	
29	D.I	Bt. Partupangan	1.200	630,16	26,93	7,09	8,70	12,66	4,25	3,02	62,65	
30	D.I	Batang Tingkarang	2.326	1.024,13	44,07	7,00	8,50	12,61	4,25	8,00	84,43	
31	D.I	Baramban III Lurah	1.164	943,00	32,00	10,94	6,00	11,01	4,25	3,86	68,06	
32	D.I	Bdr. Kubu Banda	675	461,00	44,01	9,22	6,00	11,01	4,25	3,56	78,05	
33	D.I	Bdr. Garegeh	98	77,00	28,15	10,61	7,65	11,78	4,25	7,02	69,46	
34	D.I	Bdr. Pulau	66	92,00	32,10	10,35	7,80	11,01	4,25	6,22	71,73	
35	D.I	Bdr. Rakik	97	42,00	35,25	7,00	6,40	11,01	4,25	3,55	67,46	
36	D.I	Bdr. Batu Hampa	100	46,00	34,88	7,00	6,40	11,01	4,25	3,55	67,09	
37	D.I	Bdr. Durian	200	120,00	35,71	8,10	6,40	11,01	4,25	3,56	69,03	
38	D.I	Batang Sianok	1.285	596,00	31,83	7,00	6,40	13,31	4,25	6,12	68,91	
39	D.I	Batang Gumarang	1.778	763,00	29,69	7,00	6,00	12,31	4,25	3,55	62,80	
40	D.I	Bandar Sangkir Geragahan	1.031	496,00	34,46	7,00	6,00	11,61	4,25	5,02	68,34	
41	D.I	Bandar Batang Dareh	1.128	248,00	39,22	7,00	6,00	12,61	4,25	3,55	72,63	
42	D.I	Batang Lampasi	2.180	1.277,00	42,67	12,34	8,28	14,32	4,25	9,23	91,09	
43	D.I	Batang Tabik	1.007	717,00	39,53	9,61	8,50	12,76	4,25	7,50	82,15	

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Sawah/Fung sional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)							Ket.
					Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumen tasi	P3A/GP3A /IP3A	Jumlah	
					Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%	
44	D.I	Batang Agam	633	414,00	35,64	8,83	8,50	12,61	4,25	7,64	77,47	
45	D.I	Sei. Dareh	617	227,00	35,58	6,00	8,50	12,76	4,25	6,42	73,51	
46	D.I	Batang Talawi	200	175,00	30,05	11,81	6,93	10,64	4,25	8,22	71,91	
47	D.I	Gunung Nago	2.087	1.522,21	34,70	9,85	6,00	12,31	4,25	4,53	71,64	
48	D.I	Koto Tuo	1.004	670,63	35,62	9,02	6,00	12,31	4,25	3,56	70,76	
49	D.I	Sicaung	1.285	446,10	37,91	6,00	6,00	12,31	4,25	3,56	70,03	
50	D.I	Ladang Laweh	1.140	805,76	37,82	9,54	6,00	12,31	4,25	3,55	73,47	
51	D.I	Sawah Aru	172	120,67	24,74	13,76	7,42	11,63	3,88	6,23	67,66	
52	D.I	Gadang Sini Air	54	17,10	30,34	7,00	6,00	12,31	4,25	3,55	63,45	
53	D.I	Bandar Ipuh	70	35,39	25,07	7,00	6,00	11,31	4,25	3,55	57,18	
54	D.I	Bdr. Sibaragung	600	748,00	30,73	7,00	6,00	11,01	4,25	6,02	65,01	
55	D.I	Bandar Galo Gandang	1.112	465,98	37,38	7,00	6,00	12,31	4,25	5,03	71,97	
56	D.I	Bdr. Gadang Darek	138	86,00	15,52	8,41	6,00	11,01	4,25	3,55	48,74	
57	D.I	Bdr. Rupik	42	38,00	32,95	12,21	6,00	11,01	4,25	3,56	69,99	
58	D.I	Bdr. Jambu	33	16,00	16,64	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	53,45	

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Sawah/Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)							Ket.
					Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumen tasi	P3A/GP3A /IP3A	Jumlah	
					Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%	
59	D.I	Bdr. Sigando	56	43,00	32,96	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	69,77	
60	D.I	Bdr. Muka Air	56	37,00	26,00	12,00	6,00	11,01	4,25	3,55	62,81	
61	D.I	Bdr. Bulaan Dalam	140	35,00	22,95	12,00	7,18	11,03	4,25	6,22	63,63	
62	D.I	Bdr. Gadang II Paninjauan	352	171,00	31,14	12,00	6,00	11,01	4,25	6,22	70,62	
63	D.I	Batang Parika	339	163,00	32,83	12,00	6,00	11,01	4,25	3,56	69,65	
64	D.I	Batang Selo	1.275	1.492,00	31,52	13,50	6,00	12,31	4,25	3,55	71,13	
65	D.I	Bdr. Sangki II	581,00	581,00	31,30	14,12	6,00	13,31	4,25	4,55	73,53	
	TOTAL		65.007,00	33.201,78	33,52	9,63	6,68	11,61	4,24	5,23	70,92	

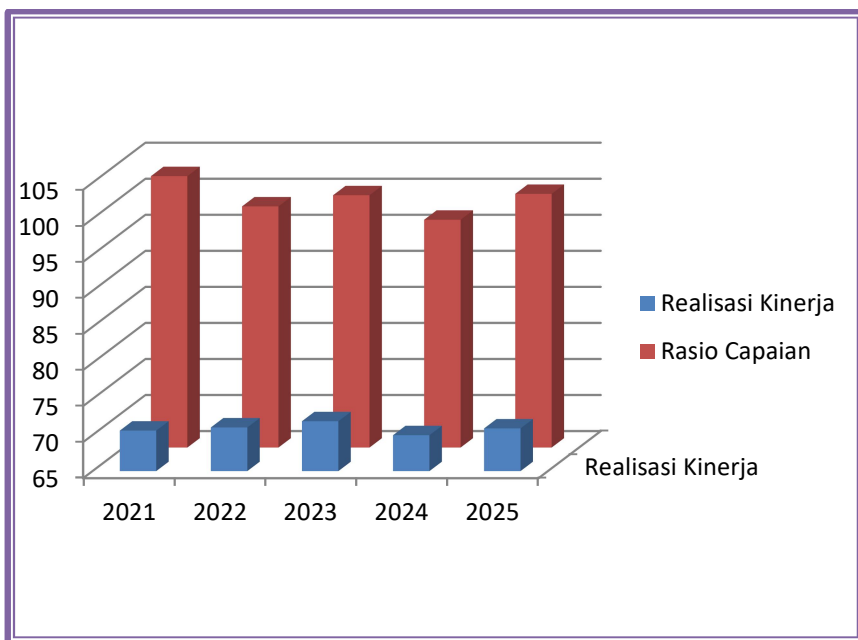
Sumber Data : Dinas SDABK 2025

3.3.1.2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.7 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Perjanjian Kinerja (%) Pada Tahun					Rasio Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	70,62	71,06	71,92	69,98	70,92	102,65	98,45	100,00	96,60	100,19

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



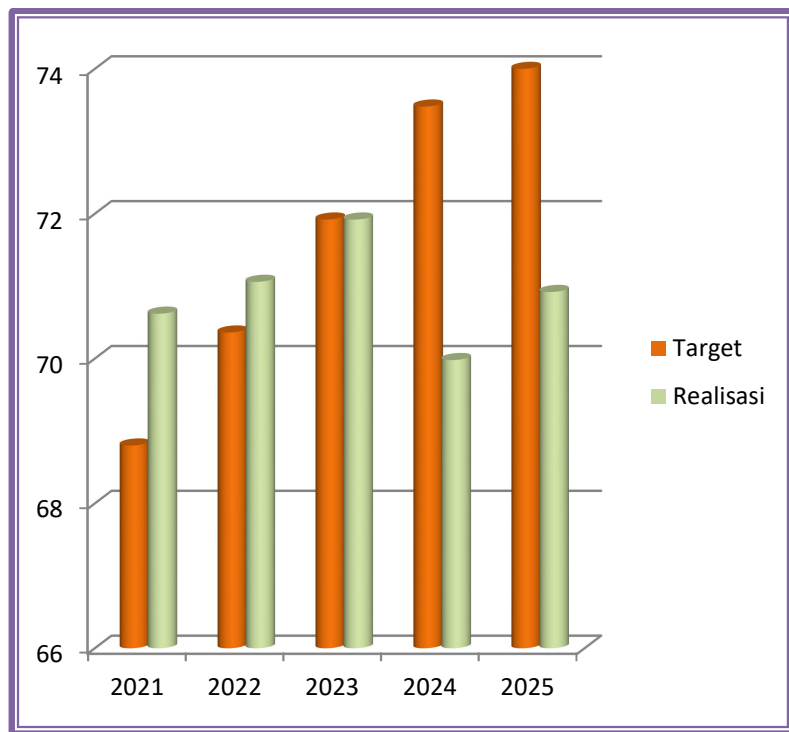
Apabila kita lihat pada tabel 3.7 dan grafik, realisasi indikator kinerja IKSI ini terjadi fluktuasi pada rentang periode 2021-2025. Dari tahun 2021-2023 target kinerja bisa terealisasi lebih dari 100% dan terjadi peningkatan namun pada tahun 2024 terjadi kegagalan pencapaian target yang disebabkan oleh bencana banjir bandang dan galodo Marapi sehingga terjadi kerusakan prasarana fisik irigasi. Kegagalan pencapaian target 2024 juga disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran (fisik dan penunjang) untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Pada tahun 2025 ini target yang dicanangkan pada awal tahun kembali bisa tercapai berkat kematangan perencanaan dan soliditas pelaksanaan walaupun adanya efisiensi anggaran.

3.3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kinerja sistem irigasi	68,80	70,62	70,36	71,06	71,92	71,92	73,48	69,98	75,04	70,92

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Dari tabel 3.8 tercantum target tahun 2025 bila berpedoman pada dokumen renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi 2021-2026 adalah 75,04%. Namun dari hasil analisis alokasi anggaran tahun 2025 yang tersedia pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penopang untuk mendukung pencapaian target nilai IKSI sangat jauh berkurang dibandingkan dengan pagu anggaran yang direncanakan pada dokumen renstra. Sehingga berdasarkan realisasi yang telah diraih tahun 2024 yaitu sebesar 69,98% dan prediksi pertambahan nilai IKSI tahun 2025 sebesar lebih kurang 0,81% maka ditetapkan target Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2025 sebesar 70,79% dengan realisasi sebesar 70,92% yang berarti nilai capaian lebih dari 100%.

3.3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait dengan sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, tidak bisa dibandingkan dengan sasaran strategis yang dimiliki oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR terkait irigasi karena terdapat perbedaan sasaran yaitu volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (IKSS-4).

3.3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKSI didukung oleh beberapa upaya dan kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 5.736,22 meter (1.379,63 ha)
2. Operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi UPTD Balai SDABK Wilayah Utara 160 km dan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi UPTD Balai SDABK Wilayah Selatan 119 km.
3. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi sebanyak 80 unit
4. Pemberdayaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A)

Tabel 3.9
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Penunjang Prasarana Fisik IKSI Tahun 2025

No.	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Target		Realisasi		Kewenangan		Realisasi Capaian (%)
			Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)	Output (M)	Outcome (Ha)	Prov.	Pusat	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
1		D.I Bandar Gadang	√		108,00	13,00	57,10	15,74	√		52,87
2		D.I Bintungan		√	108,00	12,00	41,25	23,53	√		38,19
3		D.I Muaro Danau		√	100,00	11,00	95,30	11,50	√		95,30
4		D.I Bandar Pamujan		√	108,00	13,00	123,44	22,05	√		114,30
5		D.I Bandar Panjang Selayo	√		108,00	12,00	12,75	20,88	√		11,81
6		D.I Bandar Lembang		√	108,00	12,00	66,40	17,79	√		61,48
7		D.I Batang Bayang		√	112,00	11,00	77,70	20,15	√		69,38
8		D.I Batang Surantih		√	75,00	8,00	81,00	11,93	√		108,00
9		D.I Lubuak Sariak		√	118,00	13,00	83,80	13,69	√		71,02
10		D.I Pekonina		√	100,00	13,00	82,82	26,10	√		82,82
11		D.I Bandar Sawah Padang		√	119,00	10,00	123,70	2,92	√		103,95

LKJIP 2025 SDAEK-Sumbar

No.	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Target		Realisasi		Kewenangan		Realisasi Capaian (%)
			Primer	Sekun der	Output (M)	Outcome (Ha)	Output (M)	Outcome (Ha)	Prov.	Pusat	
12		D.I Batang Suliti	√		100,00	14,00	103,42	33,17	√		103,42
13		D.I Batang Bangko		√	91,00	13,00	25,00	24,62	√		27,47
14		D.I Baramban III Lurah	√		100,00	11,00	103,00	11,15	√		103,00
15		D.I Bdr. Kubu Banda	√		50,00	11,00	53,00	8,99	√		106,00
16		D.I Ladang Laweh		√	113,00	13,00	113,00	18,50	√		100,00
17		D.I Bandar Galo Gandang	√		250,00	19,00	151,00	22,28	√		60,40
18		D.I Bdr. Gadang Darek		√	110,00	9,00	283,90	4,22	√		258,09
19		D.I Bdr. Bulaan Dalam		√	110,00	4,00	164,83	1,61	√		149,85
20		D.I Batang Parika		√	250,00	10,00	307,00	10,16	√		122,80
21		D.I Batang Selo	√		300,00	15,00	115,00	14,58	√		38,33
22		D.I Bandar Sangkir Geragahan		√	100,00	20,00	111,00	20,00	√		111,00
23		D.I Bandar Sapan Kayu Manang	√		100,00	12,00	107,12	22,30	√		107,12
24		D.I Bandar Halim		√	324,00	15,00	341,00	15,00	√		105,25
25		D.I Sungai Samek		√	110,00	11,00	79,60	19,80	√		72,36

LKJIP 2025 SDAEK-Sumbar

No.	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Target		Realisasi		Kewenangan		Realisasi Capaian (%)
			Primer	Sekun der	Output (M)	Outcome (Ha)	Output (M)	Outcome (Ha)	Prov.	Pusat	
26		D.I Batang Tabik	√		250,00	25,00	256,00	56,00	√		102,40
27		D.I Sicaung		√	325,00	26,00	200,00	76,00	√		61,54
28		DI. Bdr. Lawas Sirukam	√		100,00	13,00	21,50	13,00		√	
29		DI. Bdr Ubo		√	108,00	13,00	77,50	20,60		√	
30		D.I Bdr. Muka Air		√	115,00	13,00	140,00	15,00	√		121,74
31		D.I Bdr. Jambu		√	117,00	14,00	151,00	10,00	√		129,06
32		D.I Bdr. Rupik	√		227,00	27,00	227,00	42,00	√		100,00
33		D.I Sicaung (Lanjutan)		√	225,00	26,00	89,00	32,00	√		39,56
34		D.I Gunung Nago		√	111,00	13,00	110,00	43,00	√		99,10
35		D.I Batang Agam		√	97,00	11,00	50,00	200,00	√		51,55
36		D.I Rimbo Tampurung		√	97,00	11,00	50,00	15,00	√		51,55
37		D.I Batang Selo (Lanjutan)	√		186,00	22,00	86,00	150,00	√		46,24
38		D.I Kapar Ampu		√	154,00	18,00	112,00	24,00	√		72,73
39		D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	√		221,00	26,00	35,00	45,00	√		15,84

LKJIP 2025 SDAEK-Sumbar

No.	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Jenis Irigasi		Target		Realisasi		Kewenangan		Realisasi Capaian (%)
			Primer	Sekun der	Output (M)	Outcome (Ha)	Output (M)	Outcome (Ha)	Prov.	Pusat	
40		D.I Baramban III Lurah		√	398,00	47,00	400,00	56,00	√		100,50
41		D.I Ladang Laweh (Lanjutan)		√	125,00	15,00	75,00	25,00	√		60,00
42		D.I Batang Suliti (Lanjutan)	√		100,00	12,00	185,20	32,10	√		185,20
43		D.I Batang Bayang (Lanjutan)		√	180,00	21,00	141,30	29,30	√		78,50
44		D.I Lubuak Sariak (lanjutan)		√	97,00	11,00	70,50	15,20	√		72,68
45		D.I Bandar Batang Lembang (Lanjutan)		√	96,00	11,00	28,65	18,40	√		29,84
46		D.I Bandar Gadang (Lanjutan)		√	165,00	19,00	26,70	21,50	√		16,18
47		D.I Batang Surantih (Lanjutan)		√	57,00	7,00	52,50	14,20	√		92,11
48		D.I Muaro Danau (Lanjutan)		√	108,00	13,00	248,24	13,70	√		229,85
		Total					5.736,22	1.379,63			

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Sesuai yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas SDABK bahwa target IKSI adalah sebesar 70,79 dan terealisasi sebesar 70,92 dengan capaian 100,19%. Dengan capaian tersebut bisa dilihat bahwa Dinas SDABK mampu mencapai target yang telah ditetapkan walaupun terkendala oleh terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja Dalam Melaksanakan APBN dan APBD tahun Anggaran 2025. Dimana dalam SK tersebut didalamnya diatur bahwa kegiatan yang bersumber dari DAU serta DAK untuk tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas SDABK batal dilaksanakan sehingga nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi pada Aspek Prasarana Fisik tidak dapat meningkat secara optimal.

Untuk kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja irigasi sistem walaupun sebenarnya upaya ini hampir sama tiap tahunnya namun perlu untuk dilakukan karena pencapaian yang belum optimal. Upaya tersebut adalah:

- a. Peningkatan pengawasan pada daerah jaringan irigasi sehingga penggunaan air pada jaringan irigasi tepat peruntukannya
- b. Penyusunan regulasi untuk penetapan sempadan jaringan irigasi dan sempadan sungai pada WS Kewenangan Provinsi
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan pada daerah irigasi dan wilayah sungai kewenangan provinsi
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta stakeholder terkait untuk pemanfaatan irigasi lahan pertanian
- f. Peningkatan pagu anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas.

3.3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\% \\ &= \frac{(47.867.447.157,18 \times 100,19) - 39.020.464.635}{(47.867.447.157,18 \times 100,19)} \times 100\% \\ &= \mathbf{18,67\%}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (18,67\%/20) \times 50 \\ &= \mathbf{96,68\%}\end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi adalah sebesar 18,67% dan Nilai Efisiensi 96,68%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian efisiensi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan yang berbasis dari anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA, dengan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi

Disamping melakukan efisiensi anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi juga melakukan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai target indikator kinerja IKSI.

Hal yang dilakukan seperti antara lain pemberdayaan sumber daya manusia (ASN) yang ada dimana selain mengerjakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya juga mengerjakan tugas-tugas lain diluar tugas dan fungsinya apabila dibutuhkan pada kondisi tertentu. Kemudian juga dilakukan efisiensi dalam pemanfaatan sarana prasarana yang ada tanpa melakukan pengadaan sarana prasarana baru dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

3.3.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kapasitas Daya Tampung Infrastruktur Sumber Air

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air dengan indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air diwujudkan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sumber air. Infrastruktur sumber air yang dimaksud disini adalah embung. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan artifisial yang berfungsi untuk menampung air hujan, limpasan (runoff), atau sumber air lain dalam volume kecil, lebih kecil dari waduk, guna mendukung pertanian, memenuhi kebutuhan domestik, ternak, dan irigasi selama musim kemarau, seringkali di daerah rawan kekeringan atau lahan tadah hujan.

Embung mempunyai fungsi dan tujuan yaitu :

- Suplesi irigasi : menyediakan air untuk sawah tadah hujan.
- Kebutuhan domestik : memenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci masyarakat.
- Peternakan : sumber air untuk ternak.
- Meninggikan muka air : untuk suplesi irigasi pertanian.

Pentingnya kaitan antara tujuan dan fungsi dibangunnya embung dengan sistem irigasi maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air sebagai indikator kinerjanya persentase volume tampungan sumber-sumber air. Untuk mendapatkan potensi volume tampungan tersebut dilakukan kajian-kajian teknis berdasarkan sumber daya air (mata air, anak sungai, dll) yang terdapat pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Total volume potensi tampungan sumber-sumber air yang ingin dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah sebesar 587.467 m³, sama

dengan target RPJMD periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 karena target pada periode tersebut belum tercapai.

Volume tampungan sumber-sumber air terus meningkat dari tahun ke tahun setelah dilakukan pembangunan infrastruktur sumber air. Jumlah volume tampungan sumber-sumber air sampai dengan tahun 2015 adalah 232.476 m³. Sedangkan pada periode RPJMD tahun 2016–2021 tampungan sumber-sumber air meningkat sehingga mencapai 304.167 m³.

Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air adalah sebagai berikut:

3.3.2.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.10
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Rasio Capaian Tahun 2025
Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40	59,40	100,00

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Perhitungan realisasi dari indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air adalah:

$$\frac{\text{Volume tampungan sumber-sumber air (m}^3\text{)}}{\text{Volume potensi tampungan sumber-sumber air (m}^3\text{)}} \times 100\%$$

$$\frac{348.946,55}{587.467} \times 100\% = 59,40\%$$

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 59,40% untuk indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air, sama seperti target kinerja pada tahun sebelumnya (2024). Hal ini didasari oleh capaian kinerja pada akhir Tahun 2023 yang telah melaksanakan pembangunan embung dengan akumulasi tampungan sebesar 348.946,55 m³ sehingga didapatkan persentase volume tampungan sumber-sumber air sebesar 59,40% dimana angka ini telah melampaui target akhir pada dokumen renstra (RPJMD) 2021-2026 sebesar 58,28%. Disamping itu pada tahun anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tambahan

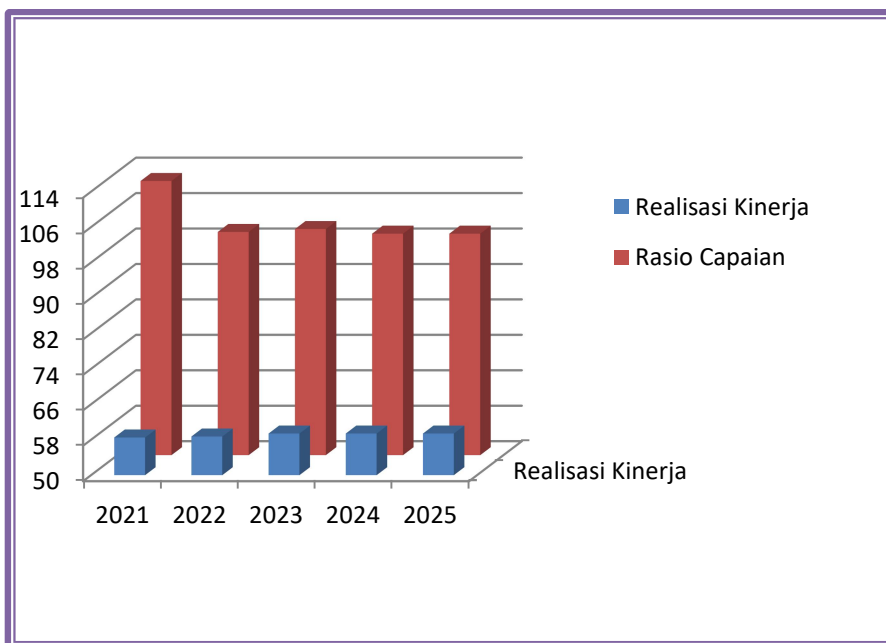
pembangunan embung melainkan hanya operasional dan pemeliharaannya saja sama seperti tahun sebelumnya (2024) sehingga tidak ada pekerjaan infrastruktur untuk peningkatan volume tampungan sumber-sumber air.

3.3.2.2. Perbandingan antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan antara Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%) Pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja(%) Pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	58,50	58,73	59,40	59,40	59,40	111,90	100,39	101,05	100,00	100,00

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



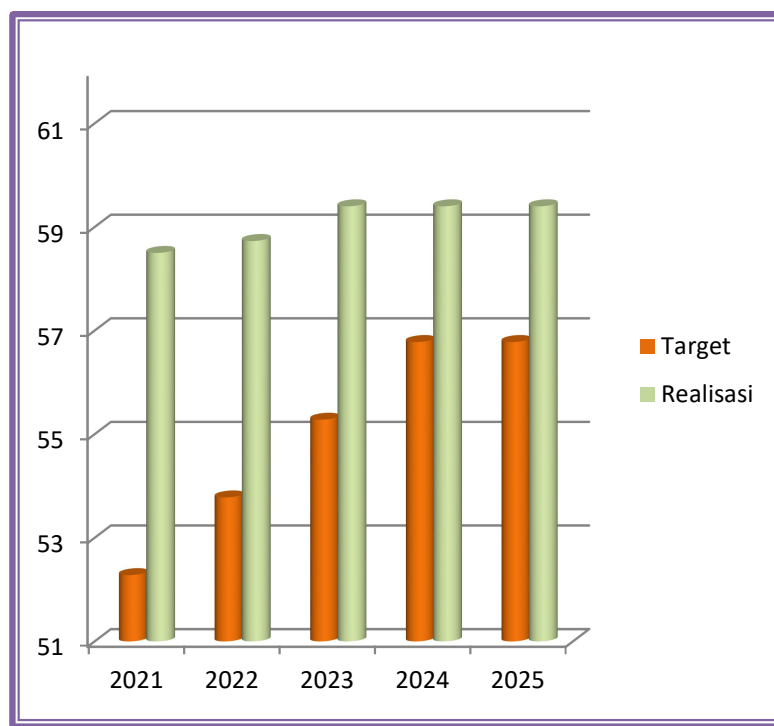
Apabila kita lihat pada tabel 3.11 dan grafik, realisasi indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air terjadi peningkatan mulai dari tahun 2021, 2022 dan secara signifikan pada tahun 2023 karena adanya pembangunan Embung Galagah Alahan Panjang Kabupaten Solok dan Pembangunan Embung dan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Penas Tani Kota Padang sehingga kapasitas daya tampung air meningkat. Hal ini menyebabkan realisasi berada pada angka 59,40 dimana ini berarti telah melewati target akhir RPJMD sebesar 58,28.

3.3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	52,28	58,50	53,78	58,73	55,28	59,40	56,78	59,40	58,28	59,40

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Pada tabel 3.12 target RPJMD tahun 2025 adalah 58,28%, namun pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditetapkan target sebesar 59,40%. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pada kondisi akhir tahun anggaran 2023 telah tercapai realisasi kinerja sebesar 59,40% yang melebihi target akhir pada dokumen renstra/RPJMD 2021-2026 sebesar 58,28% sehingga ditetapkanlah target tersebut, sama seperti pada tahun sebelumnya (2024). Disamping itu pada tahun anggaran 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tambahan pembangunan embung melainkan hanya operasional dan pemeliharaannya saja sama seperti tahun sebelumnya (2024) sehingga tidak ada pekerjaan infrastruktur untuk peningkatan volume tampungan sumber-sumber air.

3.3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR

Dirjen SDA Kementerian PUPR		Dinas SDABK Prov.Sumbar	
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air (SS-1)		Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air (SS-2)	
Kapasitas tampung per kapita (IKSS-3)	59,59 m ³ /kapita	Persentase volume tampungan sumber-air	59,40%

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa IKSS-3 Dirjen SDA Kementerian PUPR yaitu kapasitas tampung per kapita serupa dengan SS-2 Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat yaitu persentase volume tampungan sumber-sumber air, hanya terdapat perbedaan pada satuannya saja karena Dirjen SDA Kementerian PUPR memperhitungkan untuk ketersediaan per kapita sedangkan Dinas SDABK tidak. Realisasi Indikator Kinerja Kapasitas Tampung per Kapita Dirjen SDA Kementerian PUPR Tahun 2024 sebesar 59,59 m³/kapita sedangkan Indikator Kinerja Persentase Volume Tampungan Sumber-sumber Air Dinas SDABK sebesar 59,40%.

3.3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air ini tidak ada karena kondisi pada akhir Tahun 2023 telah melaksanakan pembangunan embung dengan akumulasi tampungan sebesar 348.946,55 m³ sehingga didapatkan persentase volume tampungan sumber-sumber air sebesar 59,40%, dimana angka ini telah melampaui target akhir pada dokumen renstra (RPJMD) 2021-2026 sebesar 58,28%.

Namun walaupun begitu tetap harus ada upaya yang diharapkan akan terealisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air dengan adanya tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik embung sehingga dapat menambah kapasitas daya tampung sumber-sumber air.

3.3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\% \\ &= \frac{(268.933.506 \times 100,00) - 256.211.000}{(268.933.506 \times 100,00)} \times 100\% \\ &= 4,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (4,73\%/20) \times 50 \\ &= 61,83\% \end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air adalah sebesar 4,73% dan Nilai Efisiensi 61,83%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian efisiensi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan yang berbasis dari anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA, dengan melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.

Disamping melakukan efisiensi anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi juga melakukan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai target indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air. Hal yang dilakukan seperti antara lain pemberdayaan sumber daya manusia (ASN) yang ada dimana selain mengerjakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya juga mengerjakan tugas-tugas lain diluar tugas dan fungsinya apabila dibutuhkan pada kondisi tertentu. Kemudian juga dilakukan efisiensi dalam pemanfaatan sarana prasarana yang ada tanpa melakukan pengadaan sarana prasarana baru dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

3.3.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air (sungai dan pantai) yang sangat besar, hal ini tercermin dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Sungai Silaut - Tarusan dan Wilayah Sungai Masang - Pasaman sebagai berikut:

- a. Wilayah Sungai Silaut - Tarusan (7.052,15 km²)

Tabel 3.14
DAS Wilayah Sungai Silaut - Tarusan

No.	DAS	Kabupaten/Kota	Luas (km²)
1	DAS Tarusan	Kota Padang Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok	443,733
2	DAS Bayang	Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok	399,417
3	DAS Kapas	Kab. Pesisir Selatan	392,806
4	DAS Lumpo	Kab. Pesisir Selatan	137,009
5	DAS Salido	Kab. Pesisir Selatan	93,565
6	DAS Jalamu	Kab. Pesisir Selatan	81,504
7	DAS Taluak	Kab. Pesisir Selatan	34,423
8	DAS Painan	Kab. Pesisir Selatan	31,511
9	DAS Pinang	Kab. Pesisir Selatan	27,639
10	DAS Salek BundeK	Kab. Pesisir Selatan	27,407

No.	DAS	Kabupaten/Kota	Luas (km²)
11	DAS Mandeh	Kab. Pesisir Selatan	22,503
12	DAS Pisang	Kota Padang Kab. Pesisir Selatan	20,738
13	DAS Timbulun	Kab. Pesisir Selatan	20,678
14	DAS Nyalo	Kab. Pesisir Selatan	20,299
15	DAS Langsano	Kota Padang Kab. Pesisir Selatan	19,563
16	DAS Cikandir	Kota Padang Kab. Pesisir Selatan	9,455
17	DAS Taluk Batung	Kab. Pesisir Selatan	8,694
18	DAS Gemuruh	Kab. Pesisir Selatan	7,617
19	DAS Kur	Kota Padang Kab. Pesisir Selatan	5,951
20	DAS Marak	Kab. Pesisir Selatan	2,09
21	DAS Babi	Kab. Pesisir Selatan	0,524
22	DAS Bintango	Kab. Pesisir Selatan	0,506
23	DAS Sikuai	Kab. Pesisir Selatan	0,413
24	DAS Nyamuk	Kab. Pesisir Selatan	0,129
25	DAS Palangai Gadang	Kab. Pesisir Selatan	521,265
26	DAS Kambang	Kab. Pesisir Selatan	498,75
27	DAS Surantih	Kab. Pesisir Selatan	300,156
28	DAS Amping Parak	Kab. Pesisir Selatan	116,855
29	DAS Lakitan	Kab. Pesisir Selatan	114,413
30	DAS Tunu	Kab. Pesisir Selatan	33,338
31	DAS Pulakek	Kab. Pesisir Selatan	21,538
32	DAS Airhaji	Kab. Pesisir Selatan	406,635
33	DAS Silaut	Kab. Pesisir Selatan	402,975
34	DAS Punggasan	Kab. Pesisir Selatan	143,858
35	DAS Bentayan	Kab. Pesisir Selatan	127,245
36	DAS Indrapura	Kab. Pesisir Selatan	2.556,948
		Jumlah	7.052,15

b. Wilayah Sungai Masang-Pasaman (5.668,3375 km²)

Tabel 3.15
DAS Wilayah Sungai Masang - Pasaman

No.	DAS	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)
1	DAS Sikabau	Kab. Pasaman Barat	598,6198
2	DAS Sikilang	Kab. Pasaman Barat	696,8147
3	DAS Pasaman	Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman	1.653,501
4	DAS Ampu	Kab. Pasaman Barat	157,941
5	DAS Masang Ketek	Kab. Agam Kab. Pasaman Barat	482,02
6	DAS Kinali	Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman	353,361
7	DAS Masang Gadang	Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Kab. Agam Kota Bukittinggi	1.726,08
Jumlah			5.668,3375

Dengan potensi sumber air dan jumlah sungai yang banyak tersebut di sisi lain dapat menjadi ancaman banjir dan longsor, serta panjangnya garis pantai yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat sangat rawan terhadap abrasi pantai. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan risiko/mitigasi bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air tersebut dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menjaga fungsi infrastruktur pengendalian daya rusak air untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik lainnya. Maka sesuai dengan tujuan dibentuknya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sektor Sumber Daya Air maka ditetapkanlah sasaran strategis meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

Total luas kawasan terdampak daya rusak air yang ingin ditangani selama periode RPJMD 2016-2021 ditetapkan sebesar 3.130 Ha, namun target tersebut tidak tercapai sehingga dilanjutkan pada periode 2021-2026. Total luas kawasan terdampak daya rusak air yang ingin ditangani tersebut didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan di atas dimana kawasan ini terdiri dari

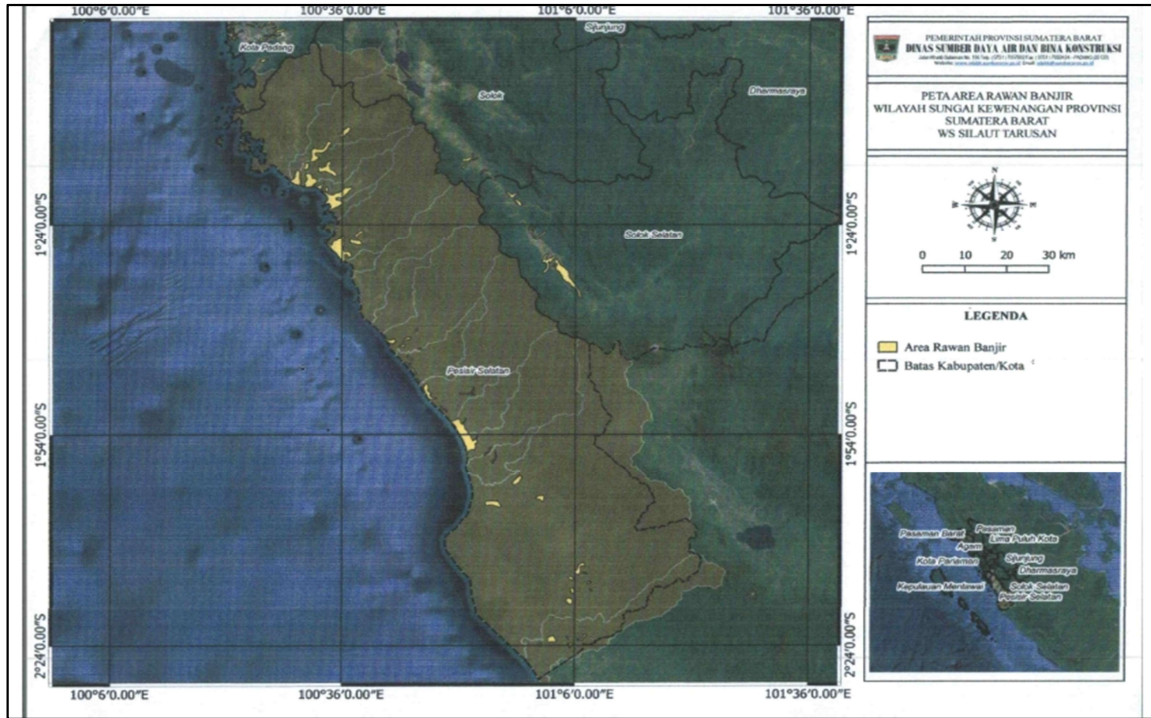
kawasan pemukiman sepanjang sungai dan kawasan pemukiman sepanjang pantai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat

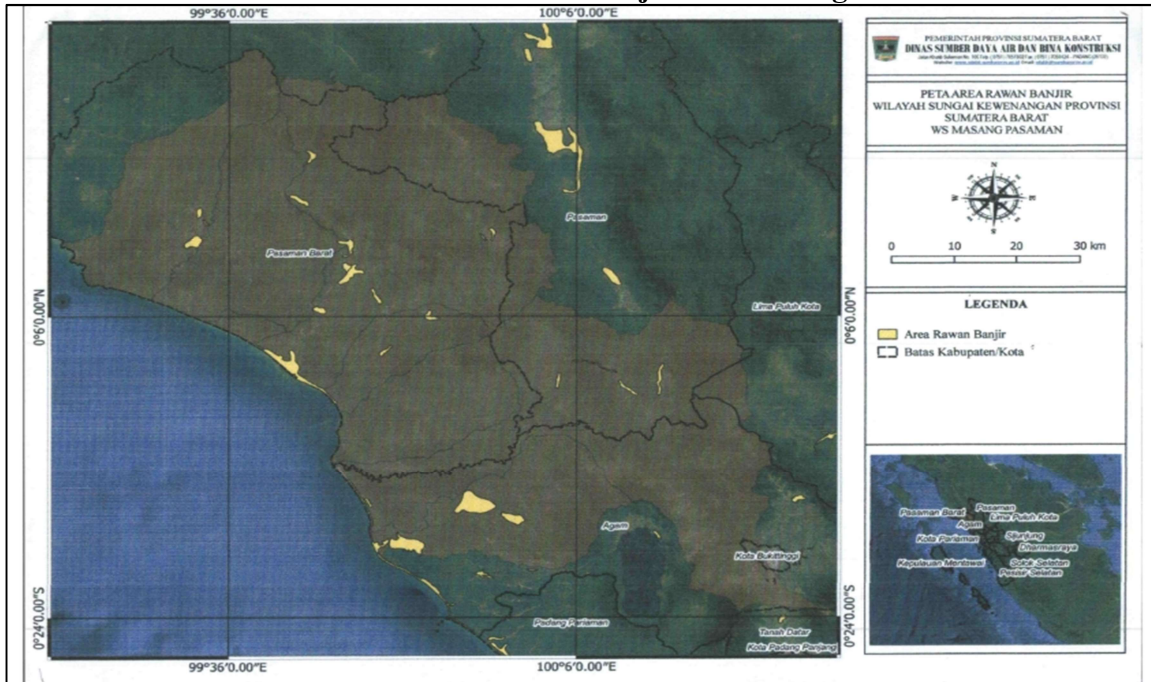
No	Nama Wilayah Sungai	Lokasi	Target Penanganan (ha)
A	WS Masang Pasaman		1.115,34
1		Labuhan	15,39
2		Bt Dareh	329,47
3		Dagang	96,21
4		Padang Tinggi	26,47
5		Maringging	26,89
6		Bukit Melintang	36,43
7		Pulau Pinang	58,69
8		Simpang Tigo Koto Baru	25,36
9		Kenagarian Aur Kuning	39,34
10		Tanjung Pangkal	36,56
11		Bancah Talang	34,69
12		Kenagarian Aia Gadang	135,44
13		Sudirman	64,04
14		Sinurut	8,50
15		Air Hangat	23,37
16		Enam Koto	38,24
17		Koto Sawah	87,22
18		Sjanih	7,54
19		Ujung Gading	25,50
B	WS Silaut Tarusan		1.884,67
1		Kampung Dalam	8,60
2		Sungai Gemuruh	41,78
3		S.Gemuruh (Tanjung Batang Kapas)	86,36
4		S.Gemuruh (Air Batu)	56,15
5		Punggasan Utara	349,94
6		Palangai (Tanjung Paku)	31,83
7		Palangai (Padang Laban)	7,93
8		Nagari Kambang (Dataran Marantih)	12,89
9		Nagari Kambang (Koto Rawang)	4,62
10		Nagari Kambang (Talang Luar)	14,53
11		Nagari Kambang (Lubuk Sarik)	4,36
12		Batang Kapas	409,43
13		Painan Timur (Kampung Luar, Sago, Bungo Pasang)	365,28
14		Pasar Baru	259,04

No	Nama Wilayah Sungai	Lokasi	Target Penanganan (ha)
15		Koto Marapak	166,12
16		Gurun Panjang	65,81
		Jumlah Total	3.000,00

Gambar 3.2 Peta Area Rawan Banjir WS Silaut - Tarusan



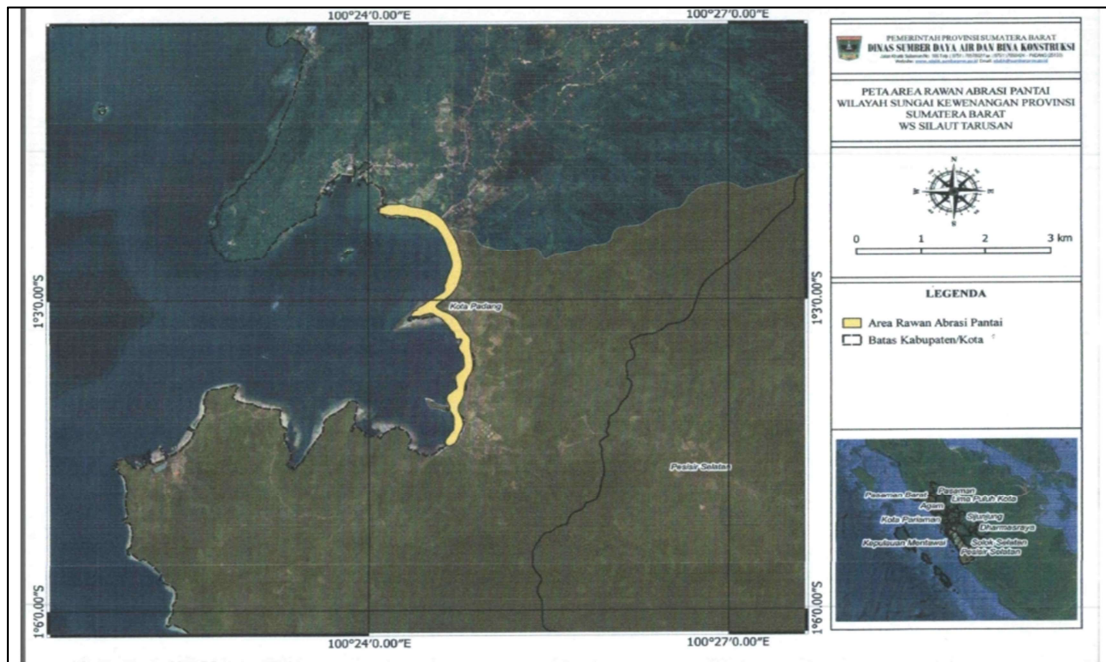
Gambar 3.3 Peta Area Rawan Banjir WS Masang - Pasaman



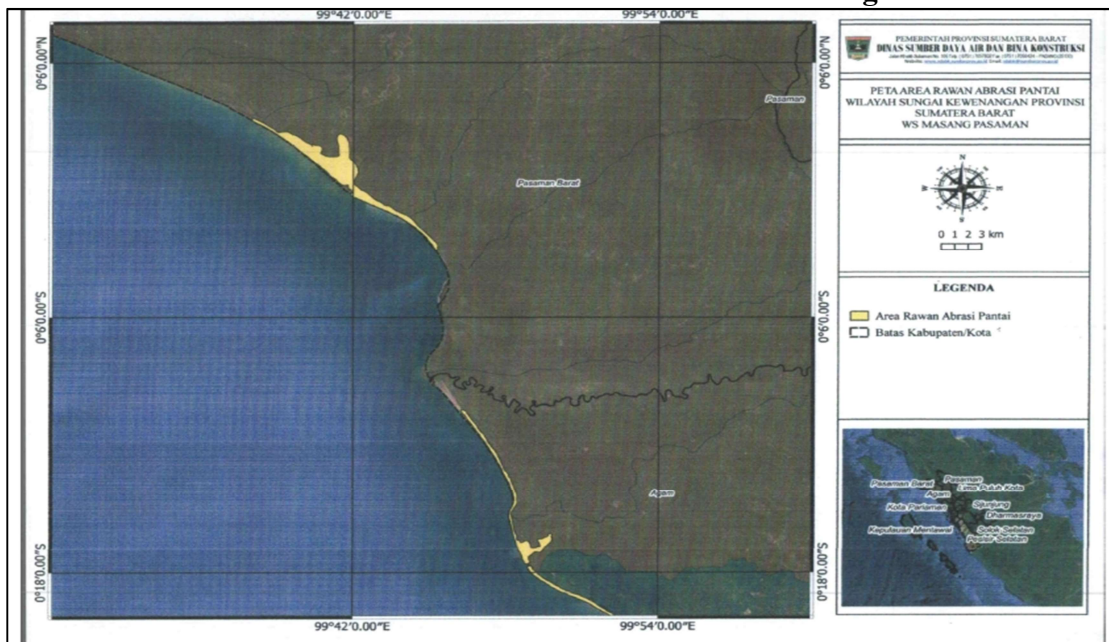
Tabel 3.17
Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah Sungai	Lokasi	Target Penanganan (ha)
A	WS Masang Pasaman		121,66
1		Jorong Rantau Panjang	121,66
B	WS Silaut Tarusan		8,34
1		Bungus	8,34
		Jumlah Total	130,00

Gambar 3.4 Peta Area Rawan Abrasi Pantai WS Silaut - Tarusan



Gambar 3.5 Peta Area Rawan Abrasi Pantai WS Masang - Pasaman



Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air adalah sebagai berikut:

3.3.3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.18
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian
Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38%	69,16%	101,14%

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Pada tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menetapkan target untuk indikator kinerja Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air sebesar 68,38%. Hal ini didasari pada realisasi yang telah diraih pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 68,22% dengan akumulasi luas kawasan yang terlindungi sebesar 2.135,41 ha. Kemudian dari hasil analisis alokasi anggaran awal tahun 2025 yang tersedia pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penopang untuk mendukung pencapaian target maka diprediksi penambahan luas kawasan yang terlindungi sebesar lebih kurang 5 ha dengan persentase sebesar 0,16% sehingga ditetapkanlah target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi 68,38%.

Pada kondisi akhir tahun 2025 telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk pengamanan kawasan sungai dan pantai seluas 29,32 ha seperti rincian yang tercantum pada tabel 3.19. Hasil ini terjadi disebabkan adanya tambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2025 sehingga bila ditambah dengan luas pada akhir tahun 2024 maka total luas kawasan diamankan sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 2.164,73 ha. Rumus perhitungan realisasi persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2025 adalah:

$$\frac{\text{Luas kawasan teramankan (Ha)}}{\text{Luas kawasan terdampak (Ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{2.164,73 \text{ ha}}{3.130 \text{ ha}} \times 100\% = 69,16\%$$

Tabel 3.19
Daftar Output Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Bungus Kota Padang		v	1.09 unit	0,23	1.04 unit	0,44	195,56%
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Muaro Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat		v	1.05 unit	0,45	1.00 Unit	0,28	62,22%
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat		v	0.415 unit	0,88	0.415 unit	1,12	127,27%
	Pembangunan Kanal Banjir								
		Pembangunan Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang	v		275,00	1,38	150	0,75	54,55%
		PERUBAHAN							
		Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang (Lanjutan)	v		23,80	0,12	25,00	0,13	105,04%
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing								
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan		v	53,98	0,54	56	0,56	103,74%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
	Peningkatan Check Dam								
		Peningkatan Checkdam Kamumuan Kabupaten Padang Pariaman	v		0,07	1,40	0,05	1,13	81,76%
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang Air Dingin Kota Padang	v		43,23	0,22	60	0,30	138,79%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang Tarok Kota Padang	v		43,28	0,22	44	0,22	101,66%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Pingai Lapau Kapeh Kabupaten Agam	v		16,94	0,17	24	0,24	141,68%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batahan Kabupaten Pasaman Barat	v		19,42	0,19	27	0,27	139,03%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batu Barong Kabupaten Padang Pariaman	v		17,87	0,18	27	0,27	151,09%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Sani Kabupaten Pesisir Selatan		v	45,83	0,46	33	0,33	72,01%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang	v		68,50	0,34	100	0,50	145,99%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Binnuang Kabupaten Padang Pariaman	v		17,84	0,18	28	0,28	156,95%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Galapung Kabupaten Padang Pariaman	v		17,84	0,18	27	0,27	151,35%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapas Lubuk Nyiur Kabupaten Pesisir Selatan		v	24,38	0,24	19	0,19	77,93%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lampasi Kota Payakumbuh	v		16,93	0,08	28	0,14	165,39%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Landir Kabupaten Pasaman		v	39,57	0,40	26	0,26	65,71%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Landu Kabupaten Pasaman		v	16,83	0,17	24	0,24	142,60%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lapau Munggu Kota Padang	v		18,39	0,09	34	0,17	184,88%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Maek Kabupaten Lima Puluh Kota	v		16,71	0,17	29	0,29	173,55%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Malakutan Kota Sawahlunto	v		16,81	0,08	29	0,15	172,52%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Malampah Kabupaten Pasaman		v	16,77	0,17	45	0,45	268,34%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Merdeka Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat		v	15,27	0,15	26	0,26	170,27%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nangin Kabupaten Pasaman Barat		v	14,21	0,14	22	0,22	154,82%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Padang Kubu Kabupaten Pasaman		v	19,46	0,19	34	0,34	174,72%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan		v	12,53	0,13	74,5	0,75	594,57%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Patimah Kabupaten Pasaman		v	16,81	0,17	145	1,45	862,58%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sawah Tambang Kota Sawahlunto	v		15,84	0,08	22	0,11	138,89%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sikabau Kabupaten Pasaman Barat		v	12,35	0,12	18	0,18	145,75%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Silungkang Oso Kota Sawahlunto	v		17,67	0,09	24	0,12	135,82%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota	v		16,93	0,17	30	0,30	177,20%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sulawat Kabupaten Padang Pariaman	v		17,84	0,18	20	0,20	112,11%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Pisang Kota Padang	v		18,34	0,09	36	0,18	196,29%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya	v		16,71	0,17	48	0,48	287,25%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Talago Gunuang Kota Sawahlunto	v		16,87	0,08	24	0,12	142,26%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kota Padang	v		13,34	0,07	24	0,12	179,91%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tian Kabupaten Pasaman Barat		v	16,89	0,17	28	0,28	165,78%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tipo Kabupaten Pasaman Barat		v	39,78	0,40	28	0,28	70,39%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ulumantu Minang Saiyo Kabupaten Solok	v		20,84	0,21	31	0,31	148,75%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ulu Suliti Kabupaten Solok Selatan	v		16,90	0,17	24	0,24	142,01%
		PERUBAHAN							
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lubuak Sarik Kabupaten Pesisir Selatan		v	37,01	0,37	20,50	0,21	55,39%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih Kota Padang	v		94,99	0,47	106,00	0,53	111,59%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar Kabupaten Pasaman Barat		v	13,93	0,14	23,70	0,24	170,16%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tanjung Pangka Kabupaten Pasaman Barat		v	13,93	0,14	24,00	0,24	172,31%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pasaman Barat		v	13,82	0,14	27,00	0,27	195,44%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Situak Kabupaten Pasaman Barat		v	13,85	0,14	23,60	0,24	170,36%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tengah Kabupaten Pasaman Barat		v	13,92	0,14	42,00	0,42	301,82%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Toman Kabupaten Pasaman Barat		v	13,93	0,14	27,20	0,27	195,29%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Jambak Kabupaten Pesisir Selatan		v	20,36	0,20	43,00	0,43	211,18%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Balai Lamo Lubuk Nyiur Kabupaten Pesisir Selatan		v	14,75	0,15	24,00	0,24	162,70%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Banda Sungkai Kabupaten Pesisir Selatan		v	14,74	0,15	17,00	0,17	115,34%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pasar Cubadak Kabupaten Pasaman		v	16,04	0,16	46,60	0,47	290,50%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Biluan Kabupaten Pasaman Barat		v	13,93	0,14	30,00	0,30	215,39%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nareh Kabupaten Padang Pariaman	v		111,66	1,12	35,00	0,35	31,34%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ganggo Mudiak Kabupaten Pasaman		v	13,91	0,14	25,00	0,25	179,75%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Subangek Kota Padang	v		15,32	0,08	30,00	0,15	195,88%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Situang Kabupaten Pasaman Barat		v	13,92	0,14	28,00	0,28	201,21%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Jantan Kabupaten Pasaman	v		58,08	0,58	230,00	2,30	395,99%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pincuran Baliak Kabupaten Tanah Datar	v		35,70	0,36	46,00	0,46	128,85%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan		v	23,86	0,24	7,00	0,07	29,34%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pauh Kota Padang	v		37,40	0,19	51,00	0,26	136,36%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Piai Kota Padang	v		30,60	0,15	30,00	0,15	98,04%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batak Kabupaten Pasaman	v		13,92	0,14	65,00	0,65	467,10%

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Silaping Kabupaten Pasaman Barat	v		13,82	0,14	30,00	0,30	217,16%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman	v		15,61	0,16	32,00	0,32	205,05%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan		v	20,75	0,21	24,00	0,24	115,64%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Agam Kabupaten Agam	v		97,75	0,98	108,00	1,08	110,49%
		Normalisasi dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Mangor Kota Pariaman	v		111,47	0,56	60,00	0,30	53,82%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang (Lanjutan)	v		81,69	0,41	70,00	0,35	85,69%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Godang Tonah Kabupaten Lima Puluh Kota	v		40,80	0,41	44,00	0,44	107,84%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Luruih Kurao Pagang Kota Padang	v		43,50	0,22	200,00	1,00	459,74%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota (Lanjutan)	v		33,15	0,33	14,00	0,14	42,23%

LKJIP 2025 SDABK-Sumbar

No	Sub Kegiatan	Output per Sub Kegiatan	Kewenangan		Target Kinerja		Pekerjaan Selesai		Ket.
			Pusat/Kab/Kota	Prov.	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	Output (M)	Outcome (M3/Ha)	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota	v		43,35	0,43	47,00	0,24	108,42%
		Normalisasi dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Tigo Nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan		v	10,25	0,10	60,00	0,60	585,51%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Onge Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan		v	9,77	0,10	26,00	0,26	266,21%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Barat Kabupaten Pesisir Selatan		v	40,55	0,41	14,00	0,14	34,53%
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapur Kecil Kabupaten Lima Puluh Kota	v		16,15	0,16	15,50	0,08	95,98%
	TOTAL							29,32	
		Panjang sungai yang ditangani			3.064,60 m				

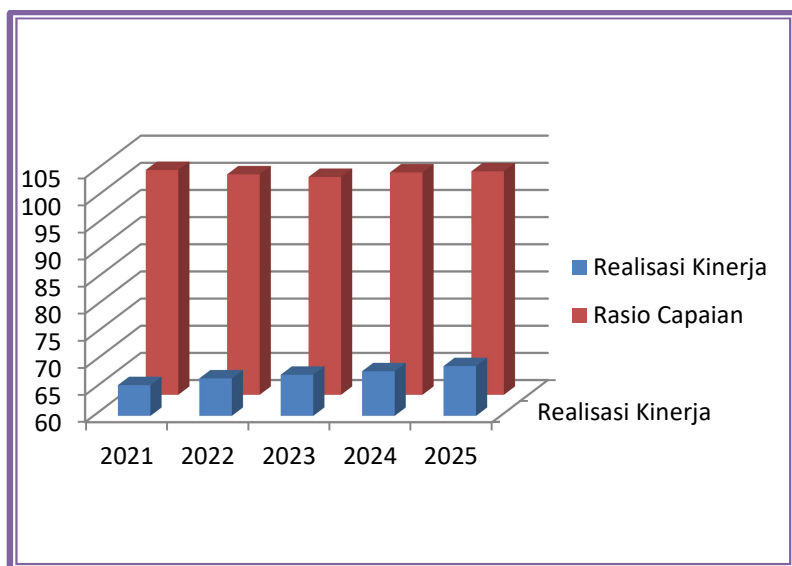
Sumber Data : Dinas SDABK 2025

3.3.3.2. Perbandingan antara Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.20 Perbandingan antara Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%) Pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja(%) Pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	65,66	66,90	67,57	68,22	69,16	101,40	100,59	100,11	100,94	101,14

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



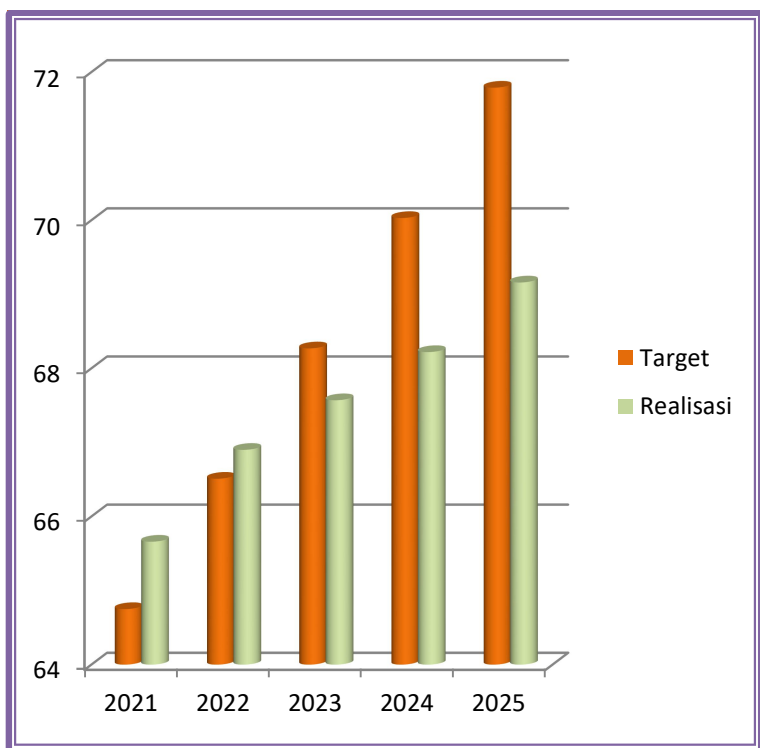
Apabila kita lihat pada tabel 3.20 dan grafik, realisasi indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air terus mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya pada rentang periode 2021-2025. Hal ini bisa kita lihat dari angka rasio capaian kinerja yang melebihi 100% tiap tahunnya. Keberhasilan tersebut tercapai berkat kematangan dalam hal perencanaan dan soliditas dalam pelaksanaan walaupun adanya keterbatasan dalam berbagai aspek.

3.3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	64,75	65,66	66,51	66,90	68,27	67,57	70,03	68,22	71,79	69,16

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Sesuai dengan tabel 3.21 target RPJMD 2021-2026 pada tahun 2025 ini seharusnya adalah 71,79%, namun target Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 untuk indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air ditetapkan sebesar 68,38%. Hal ini didasari pada realisasi yang telah diraih pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 68,22% dengan akumulasi luas kawasan yang terlindungi sebesar 2.135,41 ha ditambah prediksi luas kawasan yang terlindungi pada tahun 2025 sebesar lebih kurang 5 ha dengan persentase sebesar 0,16%. Kecilnya angka prediksi ini berdasarkan hasil analisis alokasi anggaran awal tahun 2025 yang tersedia pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penopang untuk mendukung pencapaian target sangat jauh berkurang dibandingkan dengan pagu anggaran yang direncanakan pada dokumen renstra.

3.3.3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.22
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR

Dirjen SDA Kementerian PUPR		Dinas SDABK Prov.Sumbar	
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air (SS-1)		Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air (SS-3)	
Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat (IKSS-2)	63,64%	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	69,16%

Bila kita bandingkan antara indikator kinerja Dirjen SDA Kementerian PUPR dalam hal peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat bisa dikatakan sama dengan indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air milik Dinas SDABK Provinsi Sumbar dimana realisasi yang dicapai oleh Dinas SDABK lebih tinggi dari realisasi Dirjen SDA Kementerian PUPR.

3.3.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Bila dilihat dari rasio capaian kinerja sebesar 101,14%, berarti untuk indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, mulai dari awal sejak proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tidak ditemui hambatan/kendala yang berarti namun tetap ada kondisi berulang yang rutin menghadang setiap tahunnya seperti tingginya curah hujan pada akhir tahun yang mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan serta adanya sedikit

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan material galian-c karena sumber quarry yang terbatas. Tetapi setelah dilakukan upaya seperti peningkatan intensitas pengawasan di lapangan, pengendalian administrasi secara baik dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai hasil kinerja yang optimal pada akhir tahun.

Walaupun begitu perlu juga dilakukan upaya-upaya kedepannya agar terwujud peningkatan kinerja seperti:

- ❑ Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya resiko terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- ❑ Melakukan upaya pengendalian administrasi secara baik dengan selalu memperhatikan prosedur operasional standar serta aturan yang ada;
- ❑ Peningkatan fungsi kelembagaan dan melakukan intens melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- ❑ Peningkatan pagu anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas.

3.3.3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= \frac{(43.412.456.369,51 \times 101,14) - 40.639.772.316}{(43.412.456.369,51 \times 101,14)} \times 100\% \\ &= 7,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (7,53\%/20) \times 50 \\ &= 68,82\% \end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air adalah sebesar 7,53% dan Nilai Efisiensi 68,82%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian efisiensi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan yang berbasis dari anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA, dengan melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output sebagai berikut:

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 72 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 2.003,87 meter
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai sebanyak 3 unit
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai sepanjang 26,365 km
- Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing sepanjang 56 m
- Pembangunan Kanal Banjir sepanjang 150 m
- Peningkatan Check Dam sepanjang 5 m
- Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 4 unit
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 7,92 km

Disamping melakukan efisiensi anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi juga melakukan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai target indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. Hal yang dilakukan seperti antara lain pemberdayaan sumber daya manusia (ASN) yang ada dimana selain mengerjakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya juga mengerjakan tugas-tugas lain diluar tugas dan fungsinya apabila dibutuhkan pada kondisi tertentu. Kemudian juga dilakukan efisiensi dalam pemanfaatan sarana prasarana yang ada tanpa melakukan pengadaan sarana prasarana baru dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

3.3.4 Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kompetensi SDM bidang jasa konstruksi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Sehingga selain sektor sumber daya air, Dinas SDABK juga bertugas pada sektor bina konstruksi dan untuk itu ditetapkanlah sasaran strategis meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 triliun dana konstruksi memerlukan 14.000 orang tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan hal tersebut, bila kita berpedoman kepada Buku Konstruksi Dalam Angka Tahun 2021 dimana dana konstruksi di Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 10 Triliun maka diperlukan tenaga kerja konstruksi 140.000 orang di Sumatera Barat, dan dalam buku tersebut juga tercantum bahwa perbandingan jumlah tenaga ahli dengan tenaga terampil tahun 2020 adalah 8470 : 27353 atau 1:3,23 sehingga bila diperlukan tenaga kerja konstruksi sebesar 140.000 orang maka jumlah tenaga ahli di Sumatera Barat yang dibutuhkan adalah $140.000/3,23 = 43.351$ orang. Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat adalah sebagai berikut:

3.3.4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.23
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Rasio Capaian
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,57	21,57	100,00%

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Pada awal tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menetapkan target untuk indikator kinerja persentase sumber daya manusia penyedia jasa

konstruksi yang terlatih dan bersertifikat sebesar 21,59%. Angka ini didasari pada realisasi yang telah diraih pada akhir tahun 2024 sebesar 21,36% dengan akumulasi jumlah tenaga ahli yang berkompeten di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9.259 orang kemudian ditambah rencana pelatihan dan sertifikasi (tenaga ahli yang berkompeten) yang akan diadakan tahun 2025 sebanyak 100 orang kemudian dibagi kebutuhan tenaga ahli sebanyak 43.351 orang sehingga didapatkan angka 21,59%. Namun pada APBD-P Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sehingga pelatihan dan sertifikasi yang dapat dilakukan hanya untuk 90 orang sehingga target kinerja diubah menjadi 21,57% pada Perubahan Perjanjian Kinerja pada akhir tahun. Perhitungan realisasi dari indikator kinerja persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat adalah:

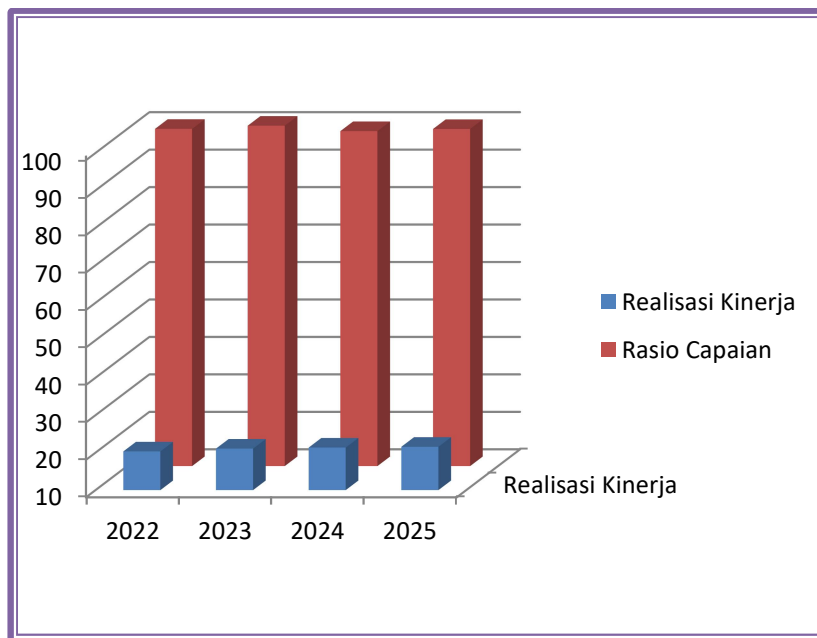
$$\frac{\text{Jumlah tenaga ahli yang berkompeten}}{\text{Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan}} \times 100\%$$
$$\frac{9.349}{43.351} \times 100\% = 21,57\%$$

3.3.4.2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.24 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%) Pada Tahun				Rasio Capaian Kinerja (%) Pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	20,33	21,08	21,36	21,57	100,03	100,87	99,43	100,00

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



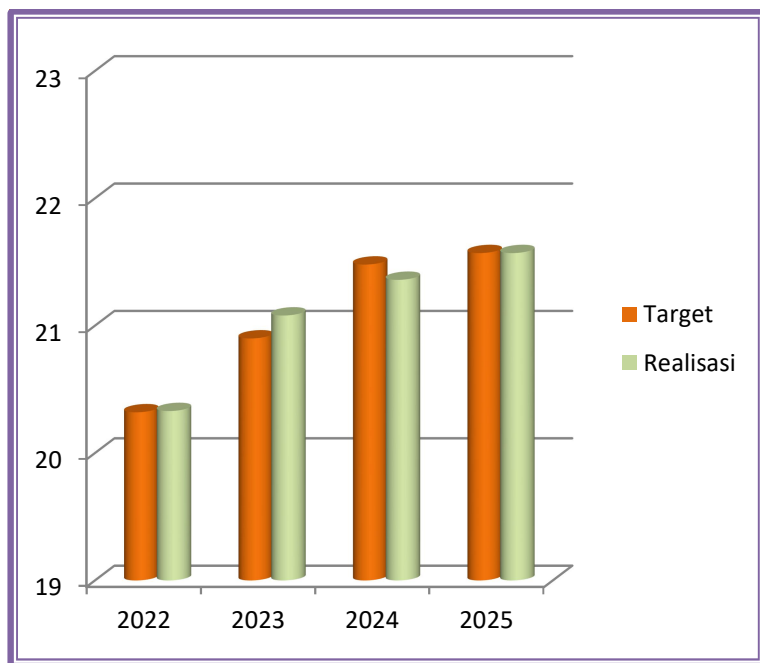
Pada pada tabel 3.24 dan grafik, bisa terlihat realisasi indikator kinerja persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat pada rentang periode 2021-2025 rata-rata tercapai setiap tahunnya kecuali pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi efisiensi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target pada saat tahun anggaran berjalan.

3.3.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	20,32	20,33	20,90	21,08	21,48	21,36	22,17	21,57

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Pada tabel 3.25 tertera bahwa target RPJMD 2021-2026 pada tahun 2025 adalah 22,17%. Angka tersebut berdasarkan asumsi bahwa akan dilaksanakannya pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga ahli konstruksi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 250 orang setiap tahunnya pada periode 5 (lima) tahun. Namun karena berkurangnya secara drastis alokasi anggaran pendukung pada tahun 2025 yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang direncanakan pada dokumen renstra maka kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi dilakukan hanya untuk 90 orang. Sehingga untuk itu dilakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 21,57% berdasarkan realisasi pada akhir tahun 2024 sebesar 21,36% dan tambahan persentase dari kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi tahun 2025 sebesar 0,21%.

3.3.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Pada sektor bina konstruksi yang juga termasuk tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, bila kita bandingkan dengan salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional selaras dengan sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi seperti disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR		Dinas SDABK Prov.Sumbar	
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Realisasi 2025
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (SS-1)		Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	
Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	4,87%	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,57%

3.3.4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya efisiensi anggaran dalam tahun berjalan sehingga anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi yang direncanakan pada awal tahun 2025 sebanyak 100 orang kemudian dikurangi menjadi hanya 90 orang sehingga harus melakukan penyesuaian target kinerja.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan kedepannya adalah perlunya peningkatan pagu anggaran secara akumulatif agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

3.3.4.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\% \\ &= \frac{(597.523.620 \times 100,00) - 543.425.590}{(597.523.620 \times 100,00)} \times 100\% \\ &= \mathbf{9,05\%}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (9,05\%/20) \times 50 \\ &= \mathbf{72,63\%}\end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi adalah sebesar 9,05% dan Nilai Efisiensi 72,63%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian tersebut adalah pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sebanyak 90 orang tenaga ahli dimana kegiatan tersebut berbasis dari anggaran Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

- Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Tabel 3.27
Daftar Tenaga Kerja yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli Tahun 2025

NO.	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	NO. SERTIFIKAT	LSP PENERBIT	KET.
1	ADI SYAF PUTRA, ST.,MT	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012215 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
2	AHMAD ROZI USMAN, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012223 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
3	AMMAZRI, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012213 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
4	AMYUSRIKI, S.Pd	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012218 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
5	AUDHIAH RAHMI, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012202 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
6	BERLIANI MUSTHOVA, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012204 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
7	DEDE SUAJI, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012222 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
8	DIYNA KAMIL, S.Pd	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012207 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
9	EDUARDO, ST, MT	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012224 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
10	FAISAL ARIF, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012217 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
11	IFZI FADILLA, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012206 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
12	Ar. Dr. Ir. IRNAWATI SIREGAR, M.Pd.T, IA	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012210 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
13	IVO FRIDINA, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012209 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
14	M. RIZKI, SE	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012205 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
15	MELKI HADI IRAWAN, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012216 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
16	MERRY THRESSIA, S.Si, M.Si, CST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012200 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
17	MUHAMMAD IMAM ARIFIN, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012201 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
18	MUTIARA NOVENNICA., SM	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012203 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
19	PANDU POERNADDIE ISWARA, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012208 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
20	RAJU ARIFAL, S.T.	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012214 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
21	REFDIZAL, ST, MT	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012220 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
22	ROSI SYAVITRI, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012212 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	

NO.	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	NO. SERTIFIKAT	LSP PENERBIT	KET.
23	SYOFIAN TANJUNG, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012221 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
24	WAHYU RAMADHAN, ST.	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012211 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
25	WILMAN, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012225 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
26	YULI HANDRI, ST	K3 Konstruksi dan Manajemen Konstruksi	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Muda K3 Konstruksi	74321 2263.02 7 00012219 2025	LSP Katiga Konstruksi Indonesia	
27	ABDUL HARIS POHAN	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000263 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
28	ABDUL HARISMAN	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000258 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
29	ALDO SAPUTRA	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000256 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
30	ANDRIYANSYAH	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000259 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
31	INGGRID IMANI ANNUR	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000261 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
32	IQBAL PRICESIO	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000262 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
33	ISBRAN TRIFOSA SALELEUBAJA	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000264 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
34	JIMY FRANS ANDRIKO PUTRA	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000265 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
35	MUHAMMAD HERU	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000271 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
36	MUHAMMAD REZKI	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000268 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
37	MUHAMMAD ROCKY	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000267 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
38	RIFKI AULIA RAHMAN	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000269 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
39	SUCI INDAH SARI	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000260 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
40	SYAHRONY	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000257 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
41	ZULFIKRI KAMMAR	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000266 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
42	ZULMAN	Arsitektur	Arsitektural	Ahli Asisten Arsitek	71101 2161.01 7 00000270 2025	LSP Sertifikasi Arsitek Indonesia	
43	GHAFI RAHMAT PUTRA	Teknik Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74321 2142.02 7 00039919 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	

NO.	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	NO. SERTIFIKAT	LSP PENERBIT	KET.
44	MHD ZAIMUL HAQ	Teknik Sumber Daya Air	Sipil	Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air	74321 2142.08 7 00039918 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
45	PETRI	Teknik Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	74321 2151.99 7 00000882 2025	LSP Kompetensi Penunjang Konstruksi Mandiri	
46	RIA DELIARTI	Teknik Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74321 2142.02 7 00039922 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
47	RISKA WAHYUNI BATUBARA	Teknik Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74321 2142.02 7 00039920 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
48	SUTARMAN	Teknik Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74321 2142.02 7 00040142 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
49	ZARNI HIDAYAH	Teknik Bangunan Gedung	Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74321 2142.02 7 00039921 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
50	DESMAN REFIKA	Teknik Sumber Daya Air	Sipil	Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air	74321 2142.08 7 00040974 2025	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri	
51	YONNARLIS GINTING	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Tenik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219086 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
52	SYAFRIZAL	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya Teknik Jembatan	74312 2424 4 0219087 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
53	ADE ANGGRAINY	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219088 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
54	TRI IFANDI ARDI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Teknik Jalan	74312 2424 4 0219089 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
55	INDRA FARNI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Utama Hidrolika	74312 2424 4 0219090 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
56	ALBERT ANWAR	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	AHLI MADYA TEKNIK SUMBER DAYA AIR	74312 2424 4 0219091 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
57	MEDIANA DESFITA	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	AHLI MADYA TEKNIK JALAN	74312 2424 4 0219092 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
58	MIKO JUNIARDI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	AHLI MADYA TEKNIK GEDUNG	74312 2424 4 0219093 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
59	MERRY THRESSIA	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda K3 Kontruksi	74312 2424 4 0219094 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
60	MEIFITRIANI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya K3 Kontruksi	74312 2424 4 0219095 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
61	CERRY M	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya K3 Kontruksi	74312 2424 4 0219096 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
62	IRLA ERDINA SARI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya K3 Kontruksi	74312 2424 4 0219097 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
63	ANDRIZKI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya K3 Kontruksi	74312 2424 4 0219098 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	

NO.	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	NO. SERTIFIKAT	LSP PENERBIT	KET.
64	KRIS BUDIARTO DIAR	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Arsitek	74312 2424 4 0219099 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
65	AFRIZAL S	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Arsitek	74312 2424 4 0219100 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
66	JASHARDI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Arsitek	74312 2424 4 0219101 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
67	SATRIAGUS SY	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Arsitek	74312 2424 4 0219102 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
68	AGISTA SATRYO FALCK	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74312 2424 4 0219103 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
69	ELFI	Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	AHLI MADYA TEKNIK JALAN	74312 2424 4 0219104 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
70	AMRA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli teknik Jembatan	74312 2424 4 0219212 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
71	TONI SUGIARTO	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Keselamatan Jalan	74312 2424 4 0219213 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
72	KHASNORA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Utama Teknik Jalan & Jembatan	74312 2424 4 0219214 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
73	FATHOL BARI	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Utama Teknik Jalan & Jembatan	74312 2424 4 0219215 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
74	BAKHRIL SONY	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Utama Teknik Jalan & Jembatan	74312 2424 4 0219216 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
75	SRI MURNI	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Keahlian Manajemen Konstruksi	74312 2424 4 0219217 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
76	AFRIZAL NAUMAR	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219218 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
77	JEFVI WIKAS SAPUTRA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	74312 2424 4 0219219 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
78	NURSIDIN	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219220 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
79	WILTON WAHAB	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Teknik Jalan	74312 2424 4 0219221 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
80	NAMUNC SUKMARA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	74312 2424 4 0219222 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
81	ANDY IKHVAN	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya Hidrologi	74312 2424 4 0219223 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
82	FEBRIMEN HERISTA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase	74312 2424 4 0219224 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	

NO.	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	NO. SERTIFIKAT	LSP PENERBIT	KET.
83	DERRI SARI PUTRA	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Muda Hidrologi	74312 2424 4 0219225 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
84	EXTO TENTRI	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219226 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
85	ZULFIKAR AGUS SALIM	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219227 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
86	YOLFIO	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219228 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
87	MARIFATUL HAKIM	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	74312 2424 4 0219229 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
88	MASRIZAL	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	74312 2424 4 0219230 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
89	MAIZAR KURNIAWAN	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219231 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
90	CHAIRIL UMRI	Peningkatan Asesor Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	74312 2424 4 0219232 2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	

3.3.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Sehingga selain sektor sumber daya air, Dinas SDABK juga bertugas pada sektor bina konstruksi dan untuk itu ditetapkanlah sasaran strategis sektor bina konstruksi lainnya yaitu meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dengan indikator kinerja persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik. Badan usaha yang akan dinilai kinerjanya adalah badan usaha yang berkontrak pada tahun bersangkutan pada internal Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta OPD lain ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dasar penilaian diambil dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

PPK melakukan penilaian kinerja setelah :

- a. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
- b. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
- c. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:

- a. Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
- b. Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
- c. Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
- d. Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.

Disamping itu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada stakeholder jasa konstruksi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga muaranya diharapkan terjadi peningkatan kinerja penyedia jasa konstruksi dan peningkatan mutu konstruksi/infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

3.3.5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.28
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio
Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00%	100,00%	106,38%

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Realisasi kinerja dari sasaran strategis ini diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase badan usaha jasa} \\
 \text{konstruksi yang berkinerja} \\
 \text{baik} &= \frac{\text{jumlah badan usaha yang berkinerja baik}}{\text{jumlah badan usaha terkontrak}} \times 100\% \\
 &= \frac{50}{50} \times 100\% = \mathbf{100,00\%}
 \end{aligned}$$

Program yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan tercapainya target dari indikator persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat berbasis pada DPA Dinas SDABK yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi dan Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

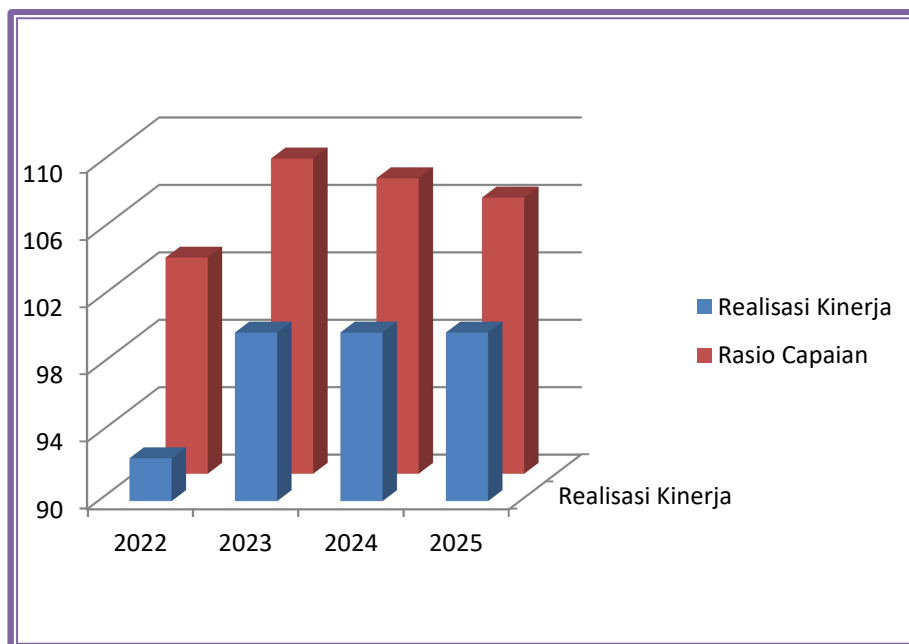
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja berupa penilaian terhadap badan usaha jasa konstruksi sebanyak 50 badan usaha yang berkontrak di Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dan OPD lainnya di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan penilaian akhir berkinerja baik. Disamping itu Dinas SDABK juga telah melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pelatihan bidang jasa konstruksi kepada badan usaha dan pihak-pihak terkait.

3.3.5.2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%) Pada Tahun				Rasio Capaian Kinerja (%) Pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	92,54	100,00	100,00	100,00	102,82	108,70	107,53	106,38

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



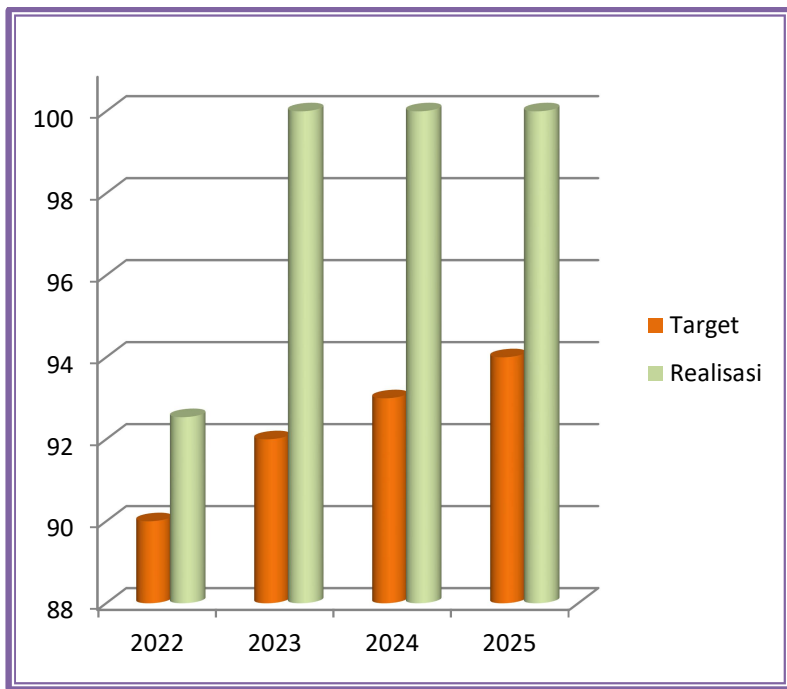
Seperti terlihat pada tabel 3.28 dan grafik, target indikator kinerja persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik pada rentang periode 2022-2025 rata-rata bisa terealisasi dengan rasio capaian lebih dari 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di lingkup Provinsi Sumatera Barat bisa dikategorikan baik berdasarkan parameter pengukuran yang telah diterapkan.

3.3.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	90,00	92,54	92,00	100,00	93,00	100,00	94,00	100,00

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Seperti terlihat pada tabel 3.29 dan grafik, realisasi kinerja indikator sasaran persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik pada rentang periode 2023-2025 bisa terealisasi 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2022 realisasi dibawah 100% yaitu sebesar 92,54% namun masih di atas angka target sebesar 90,00%.

3.3.5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Sasaran strategis meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi sebagai sasaran ke-5 Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki komparasi yang sesuai dengan salah satu sasaran strategis yang dimiliki oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

3.3.5.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pencapaian target dari sasaran strategis ini tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti dalam prosesnya yang dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian tersebut terwujud dengan melaksanakan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyedia jasa konstruksi pada internal Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat serta pada OPD lain ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat. Namun walaupun begitu kedepannya perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar institusi yang terkait dengan jasa konstruksi baik itu pihak pemerintah maupun swasta.

3.3.5.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= \frac{(248.836.850 \times 106,38) - 218.993.525}{(248.836.850 \times 106,38)} \times 100\% \\ &= 18,37\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (18,37\%/20) \times 50 \\ &= 95,93\% \end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi adalah sebesar 18,37% dan Nilai Efisiensi 95,93%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian tersebut adalah pelaksanaan penilaian penyedia jasa yang berkontrak di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta OPD ke-PU-an lainnya dimana kegiatan tersebut berbasis pada anggaran Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi dan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota
- Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi

3.3.6 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan salah satu sasaran strategis yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2012 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem

pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sedangkan LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan laporan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN.

Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

3.3.6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.31
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A (81,00)	A (82,77)	102,19

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

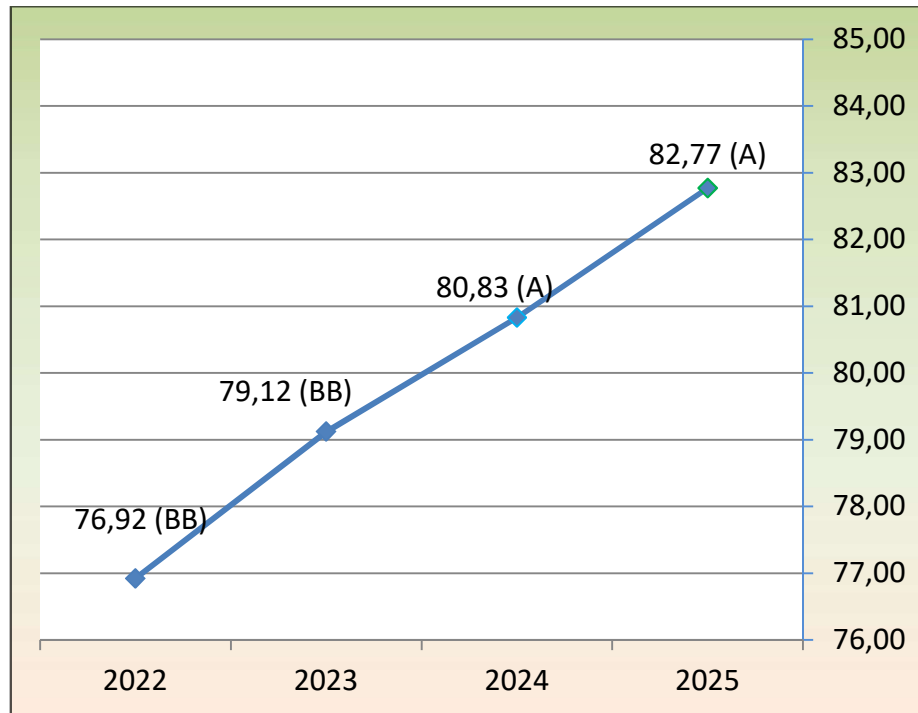
Pada Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/110/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 82,77 (kategori A) dengan pengertian SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi **Memuaskan**. Perincian nilai evaluasi AKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025 tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,25
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,89
- c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,63
- d. Evaluasi Internal dengan nilai 20,00

3.3.6.2. Perbandingan antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Progres peningkatan terhadap nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi dari Tahun ke Tahun



Pada grafik di atas bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan nilai akuntabilitas yang diperoleh oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bentuk komitmen Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan dan sistem organisasi yang efektif, efisien dan berorientasi hasil dalam menopang sukses dan terselenggaranya visi dan misi kepala daerah.

3.3.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.32

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	A	BB	A	A	A	A

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK

Seperti terlihat pada tabel 3.31 bahwa baru pada tahun 2024 dan 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mencapai realisasi dari target nilai akuntabilitas A yang dicanangkan dalam dokumen renstra sejak tahun 2023. Hal ini bisa terwujud dari bentuk komitmen Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

3.3.6.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja secara nasional yaitu dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR Tahun 2025 masih belum ada data yang didapatkan sampai dengan saat ini.

3.3.6.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan gambar 3.6 bahwa terjadi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi setiap tahunnya, terutama pada tahun 2024 dan 2025 yang mendapatkan nilai A. Hal ini terwujud dengan adanya koordinasi yang intens dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai pengawas pelaksanaan serta Biro Organisasi Setdaprov Sumatera Barat sebagai penata pelaksanaan. Disamping itu hal yang tak kalah penting adalah adanya monitoring dan evaluasi internal organisasi SDABK secara berkala dalam rangka pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya dan Bina Konstruksi dengan memberikan pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang dilengkapi dengan pemaparan hambatan dan kendala serta langkah penyelesaian. Pada triwulan IV, rapat monitoring dan evaluasi kinerja semakin intensif dilakukan untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta mengantisipasi pekerjaan yang akan putus kontrak atau yang akan melewati tahun anggaran.

Gambar 3.7
Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas SDABK Prov. Sumbar



3.3.6.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\% \\ &= \frac{(63.360.000 \times 102,19) - 34.012.000}{(63.360.000 \times 102,19)} \times 100\% \\ &= \mathbf{48,51\%}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (48,51\%/20) \times 50 \\ &= \mathbf{171,27\%}\end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar 48,51% dan Nilai Efisiensi 171,27%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian tersebut adalah:

- Melakukan dialog kinerja secara berjenjang pada awal tahun untuk menentukan target kinerja yang disinkronkan dengan Perjanjian Kinerja eselon II
- Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja secara rutin dan berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target
- Melakukan perbaikan dan upaya-upaya untuk solutif bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja

3.3.7 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey ini dilakukan terhadap 90 responden yang terdiri dari ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, ASN OPD lain lingkup Provinsi

Sumatera Barat dan masyarakat umum terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi melalui aplikasi Sepakat. Unsur-unsur pelayanan yang menjadi dasar penilaian yaitu:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk layanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah sebagai berikut:

3.3.7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.33
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	87,75	100,29

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Pada tahun 2025 ini, dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditetapkan target nilai sebesar 87,50. Dan sesuai dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 90 orang yang telah dirangkul oleh aplikasi Sepakat maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai kepuasan sebesar 87,75 dengan rincian sebagai berikut:

**Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat**

Total	326	310	318	327	305	318	321	314	332
NRR	3.62	3.44	3.53	3.63	3.39	3.53	3.57	3.49	3.69
NRR Tertimbang	0.4	0.38	0.39	0.4	0.37	0.39	0.39	0.38	0.41
IKM	3.51								
Konversi IKM	87.75								
Nilai Layanan	B: Baik								

Keterangan :

U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.62
U2	Prosedur	3.44
U3	Waktu Pelayanan	3.53
U4	Biaya/Tarif	3.63
U5	Produk Layanan	3.39
U6	Kompetensi pelaksana	3.53
U7	Perilaku pelaksana	3.57
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.49
U9	Sarana dan Prasarana	3.69

IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan
88	Jumlah : 90 Orang
	Jenis Kelamin : L = 51 orang / P = 39 orang
	Pendidikan : SD = 0 orang
	SMP = 0 orang
	SMA = 12 orang
	DIII = 4 orang
	S1 = 44 orang
	S2 = 20 orang
	S3 = 6 orang
	Periode : 01-01-2025 s/d 31-12-2025

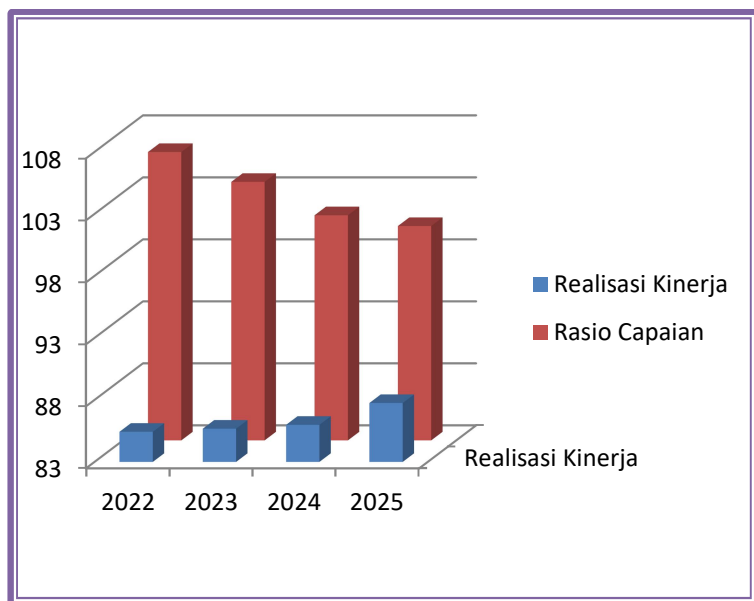
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

3.3.7.2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.34 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%) Pada Tahun				Rasio Capaian Kinerja (%) Pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85,43	85,68	85,99	87,75	106,26	103,85	101,16	100,29

Sumber Data : LKjIP Dinas SDABK



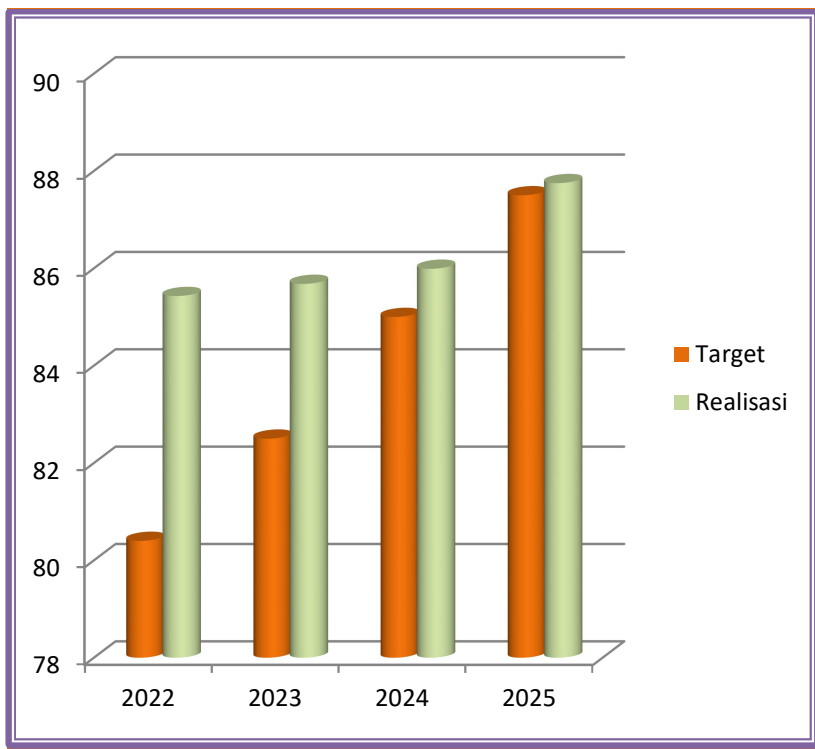
Seperti terlihat pada tabel 3.33 dan grafik, target indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada rentang periode 2022-2025 rata-rata bisa terealisasi melebihi target setiap tahunnya. Namun walaupun rasio capaian kinerja tiap tahunnya lebih dari 100% tetapi mengalami tren penurunan Hal ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan parameter pengukuran unsur-unsur pelayanan yang harus diterapkan.

3.3.7.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80,40	85,43	82,50	85,68	85,00	85,99	87,50	87,75

Sumber Data : Renstra Dinas SDABK



Seperti terlihat pada tabel 3.34 dan grafik, target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra. Setiap tahun target yang dicanangkan bisa terealisasi dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.

3.3.7.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja ini secara nasional yaitu dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR masih belum ada data yang didapatkan sampai dengan saat ini.

3.3.7.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi meningkat setiap tahunnya sejak tahun mulai ditetapkan untuk dijadikan sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Hal ini terwujud dengan mengimplementasikan secara nyata peningkatan pelayanan umum dan kepegawaian, peningkatan pengelolaan BMD dan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya serta hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan publik.

3.3.7.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= \frac{(63.360.000 \times 100,29) - 34012000}{(63.360.000 \times 100,29)} \times 100\% \\ &= 46,61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + (\text{Tingkat Efisiensi}/20) \times 50 \\ &= 50\% + (46,61\%/20) \times 50 \\ &= 166,52\% \end{aligned}$$

dimana: PA = Pagu Anggaran (Rp.)
 CK = Capaian Kinerja (%)
 RA = Realisasi Anggaran (Rp.)

Berdasarkan perhitungan di atas maka Tingkat Efisiensi Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah

sebesar 46,61% dan Nilai Efisiensi 166,52%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas SDABK dalam pencapaian efisiensi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan yang berbasis dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Disamping efisiensi anggaran, hal lain yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi untuk pencapaian target tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi seperti antara lain pemberdayaan sumber daya manusia (ASN) yang ada dimana selain mengerjakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya juga mengerjakan tugas-tugas lain diluar tugas dan fungsinya apabila dibutuhkan pada kondisi tertentu. Kemudian juga dilakukan efisiensi dalam pemanfaatan sarana prasarana yang ada tanpa melakukan pengadaan sarana prasarana baru dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

3.4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi memiliki pagu anggaran dan realisasi yang tersaji secara lengkap pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	91.548.837.033	79.916.447.951	87,29%
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.867.447.157,18	39.020.464.635,00	81,52
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	14.504.714.219,31	13.995.710.445	96,49
	2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.179.713.030	1.179.713.030	100
	3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	563.245.000	451.263.090	80,12
	4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.760.715.245	1.751.451.504	99,47
	5	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	4.206.576.529,85	4.135.049.343,00	98,30
	6	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	1.830.000	465.000	25,41
	7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	21.753.442.412,02	13.678.536.997,00	62,88
	8	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	3.897.210.721	3.828.275.226	98,23

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
2	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	91.548.837.033	79.916.447.951	87,29%
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	43.681.389.876	40.895.983.316	93,62
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	268.933.506	256.211.000	95,27%
3	Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	91.548.837.033	79.916.447.951	87,29%
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	43.681.389.876	40.895.983.316	93,62
		1 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	354.302.000	280.334.000	79,12
		2 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.776.582.306	4.666.125.283	97,69
		3 Pembangunan Kanal Banjir	2.132.866.303	2.068.341.914	96,97
		4 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.496.828.325	3.395.908.339	97,11
		5 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	962.678.561	911.004.523	94,63
		6 Peningkatan Check Dam	954.394.900	913.490.726	95,71

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	86.441.250	86.441.250	100%
	8	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	24.109.523.755	22.093.776.477	91,64
	9	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	300.000.000	294.556.148	98,19
	10	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	579.778.237	573.843.067	98,98
	11	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	59.260.000	59.260.000	100,00%
	12	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	4.384.641.948	4.106.963.074	93,67
	13	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.215.158.785	1.213.179.895	99,84
4	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	846.360.470	762.419.115	90,08
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	597.523.620	543.425.590	90,95
	1	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	206.856.500	169.098.099	81,75
	2	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.340.000	2.135.000	91,24

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
	3	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	107.100.620	103.745.000	96,87
	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.109.750	190.609.491	95,25
	5	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	78.776.750	75.499.000	95,84
	6	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.340.000	2.339.000	99,96
5	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	846.360.470	762.419.115	90,08
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	98.181.750	79.018.525	80,48
	1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1.560.000	610.000	39,10
	2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	96.621.750	78.408.525	81,15
		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150.655.100	139.975.000	92,91
	1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	6.240.000	5.585.000	89,50
	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	1.521.100	1.484.000	97,56

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
	3	Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	142.894.000	132.906.000	93,01
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.678.493.054	27.856.763.148,28	93,86
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.360.000	34.012.000	53,68
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.360.000	14.730.000	53,84
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.800.000	2.880.000	17,14
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.678.493.054	27.856.763.148,28	93,86
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.360.000	34.012.000	53,68
	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.200.000	16.402.000	85,43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dimana di dalamnya tercantum sasaran ke-4 (empat) Kepala Daerah yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menjalankan amanat tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan walaupun adanya keterbatasan dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah direncanakan dan dialokasikan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja selama kurun waktu lima tahun. Namun dalam perjalanan terdapat kebijakan-kebijakan baik itu dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi tidak selaras lagi dengan dokumen renstra, yang oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja setiap tahun sesuai dengan pagu dana yang dialokasikan. Perbandingan antara renja Tahun 2025 dengan pagu APBD Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Renja dan Pagu APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

No.	Sasaran Strategis-Indikator Kinerja	Renja		Pagu APBD T.A 2025	
		Target (%)	Anggaran	Target PK (%)	Anggaran
1.	Meningkatnya kinerja sistem irigasi-Indeks Kinerja Sistem Irigasi	75,04	99.605.582.000	70,79	47.867.447.157,18
2.	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air-Persentase volume tampungan sumber-sumber air	58,28	6.450.000.000	59,40	268.933.506
3.	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air-Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	71,79	43.574.275.000	68,38	43.412.456.370
4.	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi-Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	22,17	2.932.576.000	21,57	597.523.620
5.	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi-Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00	1.613.790.000	94,00	248.836.850
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi-Nilai akuntabilitas kinerja	A	930.000.000	A	44.160.000
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	150.000.000	87,50	19.200.000

Sumber Data : Dinas SDABK 2025

Tabel 4.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja (%)	Perubahan PK (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	70,79	70,79	70,92	100,19
2	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40	59,40	59,40	100,00
3	Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38	68,38	69,16	101,14
4	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,59	21,57	21,57	100,00
5	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00	94,00	100,00	106,38
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A(81,00)	A(81,00)	A(82,77)	102,19
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50	87,50	87,75	100,29

Sumber Data : Dinas SDABK Tahun 2025

Seperti yang kita lihat pada tabel 4.2 bahwa semua target kinerja yang telah dicanangkan bisa tercapai bahkan ada yang melebihi. Rata-rata capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat adalah 101,45%. Sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi (106,38%) dan capaian terendah adalah sasaran meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air dan meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi (100%). Rendahnya capaian sasaran-2 dan sasaran ke-4 dibandingkan sasaran yang lain disebabkan adanya

efisiensi anggaran dalam tahun berjalan sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk tambahan pembangunan embung melainkan hanya untuk operasional dan pemeliharaan bangunan embung eksisting saja (sasaran-2) serta anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi yang direncanakan pada awal tahun 2025 sebanyak 250 orang kemudian dikurangi menjadi 90 orang (sasaran-4).

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Walaupun pada tahun 2025 semua target kinerja telah tercapai, namun kedepannya masih perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Peningkatan pengawasan pada daerah jaringan irigasi sehingga penggunaan air pada jaringan irigasi tepat peruntukannya;
2. Penyusunan regulasi untuk penetapan sempadan jaringan irigasi dan sempadan sungai pada WS Kewenangan Provinsi;
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik;
4. Peningkatan fungsi kelembagaan pada daerah irigasi dan wilayah sungai kewenangan provinsi;
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk pemanfaatan irigasi lahan pertanian;
6. Peningkatan pagu anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas lebih maksimal.

Berpedoman dengan langkah-langkah di atas maka Laporan Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini juga dapat menjadi acuan dalam dasar pijakan untuk periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

L

A

M

P

I

R

A

N



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**

Jl. Khatib Sulaiman No. 106 Telp. (0751) 7057802 Fax. (0751) 7050424 Padang
website : sdabk.sumbarprov.go.id email : sdabk@sumbarprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFDA SURIANI, ST, Sp.**

Jabatan : Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat



RIFDA SURIANI, ST, Sp.

NIP. 19680516 199503 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	70,79 %
2	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,40 %
3	Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,38 %
4	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	21,57 %
5	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	94,00 %
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A (81,00)
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 29.678.493.054	PAD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 83.648.837.033	PAD
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 846.360.470	PAD
	JUMLAH	Rp 114.173.690.557	

Padang,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
 Provinsi Sumatera Barat


RIDA SURIANI, ST, Sp.
 19680516 199503 2 002

Penghargaan yang Diraih Tahun 2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Inovasi Unggulan Tahun 2025 Kategori Digital	Gubernur Sumatera Barat	Dinas SDABK Prov. Sumbar	Padang, 18 Desember 2025
2	Keaktifan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Wilayah Kerja BJKW I Banda Aceh Tahun 2025	BJKW I Banda Aceh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU	Dinas SDABK Prov. Sumbar	Banda Aceh, 9 Februari 2026





Cascading Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar

CASCADING DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

